

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MEDIASI BPSK APABILA SURAT  
PERJANJIAN DAMAI TIDAK DITANDATANGANI  
SALAH SATU PIHAK  
(Studi Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ADELLIA SALLWA BAQA RIZKI  
NIM : 145010107111128**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MEDIASI BPSK APABILA SURAT  
PERJANJIAN TIDAK DITANDATANGANI SALAH SATU PIHAK  
(Studi Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017)

ADELLIA SALLWA BAQA RIZKI  
NIM : 145010107111128

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 Juni 2018  
dan disahkan pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.  
NIP. 198004192008121002

Setiawan Wicaksono, SH., M.Kn  
NIK. 2011061812851001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si  
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH.,LLM  
NIP. 197206222005011002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ilmiah ini merupakan karya orang lain, saya anggapdicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 6 Juni 2018  
Yang menyatakan,

Adellia Sallwa Baqa Rizki



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Shenny Yuwanti, ST. dan Pratiko Yosi ST. selaku orang tua penulis yang telah memotivasi penulis.
6. Firyal, Meylla, Eri, Laras, Mba Una, Kak Reysta, Ika selaku pihak yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
7. Andin, Ima, Cindy, Chavia selaku pihak yang selalu membantu penulis dalam proses pengerjaan dan penyelesaian penelitian ini.
8. Jamela, Depon, Tsaltza, Jindil, Anul, Kemput, tamtam, jun selaku sahabat sejak kecil yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 6 Juni 2018

Adellia Sallwa Baqa Rizki

## RINGKASAN

Adellia Sallwa Baqa Rizki, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MEDIASI BPSK APABILA SURAT PERJANJIAN DAMAI TIDAK DITANDATNGANI SALAH SATU PIHAK, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn., Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.

Perbuatan Hukum yang dilakukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen tidak akan pernah luput dari suatu permasalahan ataupun sengketa, oleh karena itu pemerintah membentuk lembaga hukum seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang bergerak dibidang non litigasi. Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK tidak selamanya akan berjalan dengan baik. Dikaitkan dengan contoh kasus pada putusan hasil Mediasi No. 011/P.BPSK/10/2017 dengan para pihak Waris Antoro sebagai pihak pengadu dan PT BFI Finance sebagai pihak Teradu, dimana putusan BPSK diterbitkan dan memiliki amar putusan bahwa putusan tersebut berlaku final dan mengikat. Akan tetapi Surat Perjanjian Damai yang digunakan sebagai dasar terbitnya suatu putusan tidak ditandatangani salah satu pihak. Dalam kasus ini, Waris Antoro tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai No. 011/SPD.BPSK/10/2017.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dapat diemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum putusan hasil mediasi No.011/P.BPSK/10/2017 yang dikeluarkan oleh BPSK apabila salah satu pihak tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak yang tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai terhadap putusan BPSK. untuk menjawab permasalahan di atas, ppenelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa kualitatif dan metode deduktif sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan. Kekuatan hukum dari Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017 adalah bersifat mengikat, tetapi cacat dan dapat dibatalkan. Karena telah melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketentuan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK. Dalam ketentuan mengenai dasar BPSK serta akibat hukum dari terbitnya Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK pada kasus ini apabila salah satu pihak tidak melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Damai tidak diatur atau terjadi kekosongan hukum. Terkait Upaya hukum yang dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dengan diajukannya gugatan hukum pada perkara hukum perdata biasa.



## SUMMARY

Adellia Sallwa Baqa Rizki, Business Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, May 2018, **LEGAL FORCE OF RECONCILIATION DECISION BY CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY WHEN RECONCILIATION AGREEMENT NOT AGREED BY ONE OF PARTIES**, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn., Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.

Dispute occurring between businessmen and consumers has forced the government to establish Consumer Dispute Settlement Agency (further stated as BPSK). BPSK is established to tackle any dispute-related issues through non-litigation process. The process of settling the dispute among consumers will not always work as expected. This can be seen from the case in the Decision based on Mediation Number 011/P.BPSK/10/2017 with the complainer Waris Antoro and PT. BFI Finance as the offender, where the Decision by BPSK is issued and holds injunction suggesting that the decision is final and binding. However, the reconciliation agreement on which the decision is based was not signed by one of the parties involved. In such a situation, Waris Antoro did not sign the Reconciliation Agreement Number 011/SPD.BPSK/10/2017.

Therefore, this research is aimed to investigate the issue regarding the legal force of Decision Number 011/P.BPSK/10/2017 made based on the result of mediation and issued by BPSK when one of the parties did not sign the Reconciliation Agreement and what legal remedies can be performed by one of the parties who did not sign the agreement for BPSK. This is a normative legal research which employed statute and case approaches. The legal materials obtained were analysed with qualitative and deductive analytical methods for more systematic research writing in order to give solution to the legal issue discussed.

Based on the discussion, it reveals that the legal force of the Decision of BPSK Number 011/P.BPSK/10/2017 is binding, but legally insufficient and can be annulled, as it does not comply with the provision of Civil Code and the Decision of Industry and Commerce Minister on Execution of Obligations and Authorities of BPSK. This case in which the reconciliation agreement was left unsigned by one of the parties, there for sure causes an absence of law to emerge. A legal remedy that can be performed is bringing this case to district court as an ordinary civil case.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ringkasan.....	iv
<i>Summary</i> .....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
i	
Daftar Bagan.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Teori Tentang Kepastian Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Teori Tentang Perjanjian.....	16
C. Tinjauan Umum Teori Tentang Keadilan.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	21
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	23
F. Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....	27
G. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	30
H. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen..	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Jenis dan Bahan Hukum .....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	43
F. Definisi Konseptual .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kekuatan Hukum Putusan Hasil Mediasi No. 011/P.BPSK/10/2017 Yang Dikeluarkan Oleh BPSK Apabila Salah Satu Pihak Tidak Menandatangani Surat Perjanjian Damai .....	46
1. Kedudukan BPSK .....	46
2. Kronologi Kasus .....	60

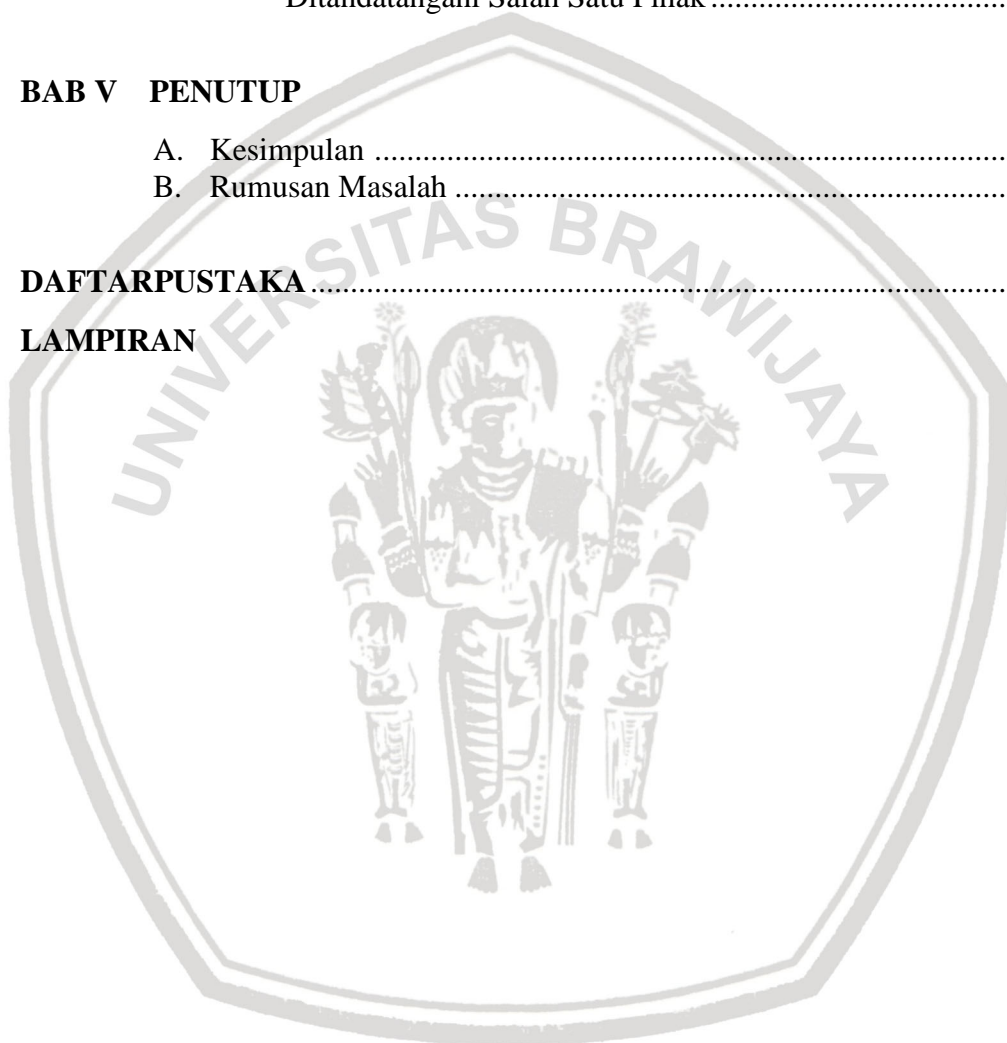
3.	Kekuatan Hukum Putusan No. 011/P.BPSK/10/2017 Apabila Tidak Ditandatangani Surat Perjanjian Damai Oleh Salah Satu Pihak .....	75
B.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Salah Satu Pihak Yang Tidak Menandatangani Surat Perjanjian Damai Terhadap Putusan BPSK ...	87
1.	Pengertian Umum Mengenai Upaya Hukum .....	87
2.	Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata .....	89
3.	Upaya hukum Keberatan Dalam BPSK .....	93
4.	Upaya Hukum Pada Putusan Hasil Mediasi yang Dikeluarkan Oleh BPSK apabila Surat Perjanjian Damai Tidak Ditandatangani Salah Satu Pihak .....	98

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	106
B.	Rumusan Masalah .....	107

<b>DAFTARPUSTAKA</b> .....	109
----------------------------	-----

## **LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	9
--------------------------------------	---



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut KEPMEN 350 .....	68
Bagan 4.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kasus Waris Antoro dan BFI Finance .....	72
Bagan 4.3 Upaya Hukum Acara Perdata .....	97
Bagan 4.4 Upaya Hukum Pada BPSK .....	97



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan ekonomi dan sosial semakin berkembang pesat. Dinamika kehidupan dalam masyarakat yang begitu kompleks dan pesat mengakibatkan dampak positif dan negatif. Hal ini sudah sangat wajar di dalam kehidupan masyarakat sosial. Dimana pasti ada suatu permasalahan dalam rutinitas kehidupan.

Membahas mengenai peningkatan ekonomi, dalam dunia internasional khususnya masyarakat Asia Tenggara, menurut *Indonesia-Investment* yaitu perusahaan investasi dan pengembangan swasta, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang tinggi dibidang ekonomi karena memiliki karakteristik serta posisi yang baik dalam perkembangan ekonomi secara pesat<sup>1</sup>. Hal ini memicu persaingan dalam peningkatan ekonomi di dalam negara Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat Indonesia melakukan banyak kegiatan dalam bidang ekonomi guna meningkatkan perekonomian mereka.

Peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia contohnya melakukan kegiatan dibidang perusahaan. Contoh perusahaan dalam hal ini dapat bergerak dibidang memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Dimana pihak yang memproduksi barang dan/atau jasa disebut pelaku

---

<sup>1</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177> diakses pukul 08.00 pada tanggal 07/03/2018

usaha. Sedangkan orang atau pihak yang membeli, menggunakan dan/atau mengonsumsi produk dari perusahaan disebut konsumen.

Terkait dengan konteks pelaku usaha dengan konsumen, terjadi perbuatan hukum seperti kesepakatan antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli suatu barang dan/atau jasa. Dimana para pihak melakukan kesepakatan sebelum terjadinya pembayaran dan penyerahan barang dan/atau jasa. Hingga pada akhirnya terjadi perjanjian jual beli.

Membahas mengenai perbuatan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tidak jarang para pihak menimbulkan suatu permasalahan. permasalahan yang terjadi dapat disebabkan dari pelaku usaha ataupun konsumen. Bisa karena pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Bisa juga karena konsumen yang melanggar kesepakatan hingga menimbulkan kerugian pada pelaku usaha. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dalam dunia perdagangan.

Membahas mengenai pelaku usaha, pelaku usaha selalu menerapkan prinsip ekonomi yaitu prinsip mencari keuntungan. Sehingga beberapa pelaku usaha menerapkan prinsip ini guna memperbesar keuntungan yang diperoleh dalam penjualan barang dan/atau jasa. akan tetapi disisi lain, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha terkadang dapat merugikan konsumen. Perbuatan pelaku usaha tersebut seperti menaikkan harga, menurunkan mutu, *dumping*, hingga memalsukan produk<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya, Bandung, 2007, hal 37

Pelaku Usaha di lain sisi terkadang menjadikan para konsumen objek aktivitas bisnis oleh pihak pelaku usaha melalui iklan, promosi serta penerapan perjanjian-perjanjian standar. Dimana Hal itu dapat merugikan konsumen itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya atau minimnya pendidikan konsumen dan rendahnya suatu kesadaran akan hak-hak dan kewajiban dari konsumen itu sendiri. Sehingga dalam hal ini dapat memicu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak Pelaku Usaha dan kurangnya kesadaran akan kewajiban serta hak-hak Konsumen menyebabkan pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Peraturan ini memberikan pengertian siapa itu pelaku usaha dan juga konsumen.

Pengertian Konsumen menurut pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>3</sup>.”

Pengertian Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42



menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>4</sup>.”

Permasalahan yang kerap timbul pada kalangan konsumen dengan pelaku usaha memicu pemerintah mendirikan sebuah Instansi. pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan proses penyelesaian sengketa antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha diluar pengadilan, yaitu lembaga hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan BPSK yaitu,

“Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”<sup>5</sup>.

BPSK merupakan badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang memiliki konsep sesuai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. BPSK juga diatur dalam pasal 49 hingga pasal 58 dalam UUPK. BPSK dalam melakukan penyelesaian sengketa konsumen terdapat tiga model penyelesaian. Dalam pasal 52 huruf a UUPK, BPSK menangani permasalahan konsumen dengan mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

Dalam menjalankan fungsi utamanya, tindakan BPSK didasarkan pada delik aduan. Artinya perkara yang diregister oleh BPSK hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan<sup>6</sup>. Apabila tidak ada, maka hal itu tidak dapat dipersengketakan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Yusuf Shofie, **Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya**, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hal 35

Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut KEPMEN 350) Yang dimaksud dengan Penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator<sup>7</sup>, sedangkan Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator<sup>8</sup>, dan Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya serta diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter dalam proses penyelesaian sengketa konsumen<sup>9</sup>.

Terkait dengan penyelesaian sengketa pada BPSK, peneliti lebih memfokuskan pada penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Mediasi termasuk sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak diluar pengadilan<sup>10</sup>. ADR merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan suatu kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan<sup>11</sup>. ADR pada prinsipnya sebagai proses penyelesaian

---

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2014, hal 4

<sup>11</sup> Susanti Adi Nugroho, **Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya**, Prenada, Jakarta, 2015, hal 6

sengketa *out of court* maupun di dalam pengadilan merupakan merupakan salah satu cara ampuh untuk mengurangi perkara<sup>12</sup>.

Proses penyelesaian sengketa pada BPSK diatur pada KEPMEN 350. dalam hal ini, prosedur penyelesaian sengketa dimulai dari pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 15 KEPMEN 350, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan secara tertulis maupun secara lisan melalui sekretariat BPSK. Setelah pengajuan permohonan, BPSK memeriksa kasus yang dapat diproses untuk diselesaikan di BPSK sesuai dengan kewenangannya. Apabila permasalahan yang diajukan bukan termasuk kompetensi BPSK, maka ketua BPSK menolak gugatan atau permohonan yang diajukan oleh konsumen sesuai dengan Pasal 17 KEPMEN 350. Apabila permohonan diterima, penentuan majelis serta panitera sesuai dengan pasal 18 sampai dengan 20 KEPMEN 350. Selanjutnya ketua BPSK melakukan pemanggilan para pihak secara tertulis dengan *copy* permohonan penyelesaian konsumen.

Proses persidangan Mediasi, majelis dalam persidangan BPSK dengan cara menyerahkan sepenuhnya pada proses penyelesaian sengketa kepada para pihak. Para majelis bertindak aktif dalam proses penyelesaian sengketa berlangsung. Setelah itu, majelis menerima hasil penyelesaian para pihak dan memberikan ketentuan kepada para pihak yang bersengketa. Yaitu mengeluarkan Surat Perjanjian Perdamaian dengan Cara Mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah

---

<sup>12</sup> Rahmadi Usman, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, PT Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 86-87

pihak. BPSK mengeluarkan putusan BPSK dan Dikuatkan dengan pembuatan Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh BPSK yang ditandatangani oleh para Majelis yang menangani sengketa tersebut.

Penemuan fakta dan data yang ditemukan pada BPSK Kota Malang terkait permasalahan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Yaitu pada kasus pelaku usaha dengan konsumen yang melakukan penyelesaian sengketa di BPSK, dimana para pihak melakukan penyelesaian dengan cara mediasi. Dalam penulisan ini, penulis mengambil suatu contoh dalam melakukan analisis. Kasus yang akan dianalisis terkait Permasalahan yang timbul pada Surat Perjanjian Damai dengan Cara Mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK tidak ditandatangani oleh salah satu pihak yang berperkara. bahwa Surat Perjanjian Damai dengan Cara Mediasi Nomor : 011/SPD.BPSK/10/2017 salah satu pihak tidak menandatangani surat tersebut, dan memiliki putusan Nomor: 011/P.BPSK/10/2017 yang berlaku mengikat pada para pihak termasuk dalam isi surat perjanjian perdamaian.

Dikeluarkannya putusan perdamaian mediasi oleh majelis BPSK dengan Surat Perjanjian Damai dengan cara mediasi yang tidak disepakati oleh salah satu pihak tidak diatur dalam PERMA No.1 tahun 2016 tentang Mediasi serta dalam KEPMEN 350 pada pasal 37 ayat (1) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan<sup>13</sup>, dimana

---

<sup>13</sup> Pasal 37 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

dalam ketentuan ini mewajibkan para pihak untuk menandatangani kesepakatan yang telah dibuat, namun tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari tidak ditandatanganinya perjanjian perdamaian oleh salah satu pihak.

Mengenai hal tersebut, penulis melakukan analisis lebih kearah kekuatan hukum pada Putusan No. 011/P.BPSK/10/2017 yang dikeluarkan oleh BPSK, dimana Surat Perjanjian Damai tidak ditandatangani oleh salah satu pihak. Dengan adanya Surat Perjanjian Damai yang tidak ditandatangani oleh salah satu pihak, terbit Putusan BPSK yang memiliki amar putusan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat serta memiliki Akta Perdamaian No. 011/AP.BPSK/10/2017 Oleh karena itu, Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MEDIASI BPSK APABILA SURAT PERJANJIAN DAMAI TIDAK DITANDATANGANI SALAH SATU PIHAK (Studi Putusan BPSK Nomor 011/P.BPSK/10/2017 )**



**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	Ni Made Ayu Ananda Dwi Satyawati (Universitas Udayana Denpasar, 2016)	Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	1. Bagaimanakah Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Apakah akibatnya apabila putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri?	Penelitian ini meneliti dan menganalisa terkait putusan BPSK dan akibat apabila putusan tersebut tidak diajukan keberatan ke pengadilan negeri
2	Lailatul Qomariyah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)	Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi (studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	1. Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi serta sanksi yang diberikan kepada salah satu pihak yang melanggar? 2. Bagaimana proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian?	Penelitian ini lebih mengarah pada kekuatan hukum dari akta perdamaian hasil mediasi dalam pengadilan Agama dan proses hukum selanjutnya.

Keterangan : Skripsi peneliti lebih kearah kekuatan hukum pada Putusan dari hasil penyelesaian secara mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK, dimana Surat Perjanjian Perdamaian dengan cara mediasi tidak ditandatangani oleh salah satu pihak bersengketa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Mediasi Nomor 011/P.BPSK/10/2017 yang dikeluarkan oleh BPSK apabila salah satu pihak tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak yang tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai terhadap putusan BPSK?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Kekuatan Hukum Putusan Mediasi Nomor 011/P.BPSK/10/2017 yang dikeluarkan oleh BPSK apabila salah satu pihak tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak yang tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai terhadap putusan BPSK

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum mengenai Kekuatan Hukum Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Nomor 011/P.BPSK/10/2017.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk Penelitian : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya, guna pengembangan hukum perlindungan konsumen.
- b. Untuk Ilmu Pengetahuan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran terhadap konsep, teori, dan praktek yang lebih baik sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum perdata bisnis.
- c. Untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) : Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka proses perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta dapat selalu memperhatikan prosedur penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Untuk Konsumen : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan rekomendasi kepada para konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dan diharapkan juga konsumen lebih aktif kembali dalam membantu penegakan hukum di Indonesia khususnya daerah Kota Malang.

- e. Untuk Pelaku Usaha : Hasil penelitian ini dapat diharapkan agar pelaku usaha juga lebih memperhatikan hak-hak konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen agar dapat mengurangi resiko bersengketa dengan konsumen.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori dalam bab ini berdasarkan tinjauan kepustakaan. Dalam bab ini berisi tinjauan teori umum tentang kepastian hukum, teori perjanjian, tinjauan tentang kekuatan putusan hakim, tinjauan umum tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tinjauan umum tentang Konsumen, dan tinjauan umum tentang pelaku usaha.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

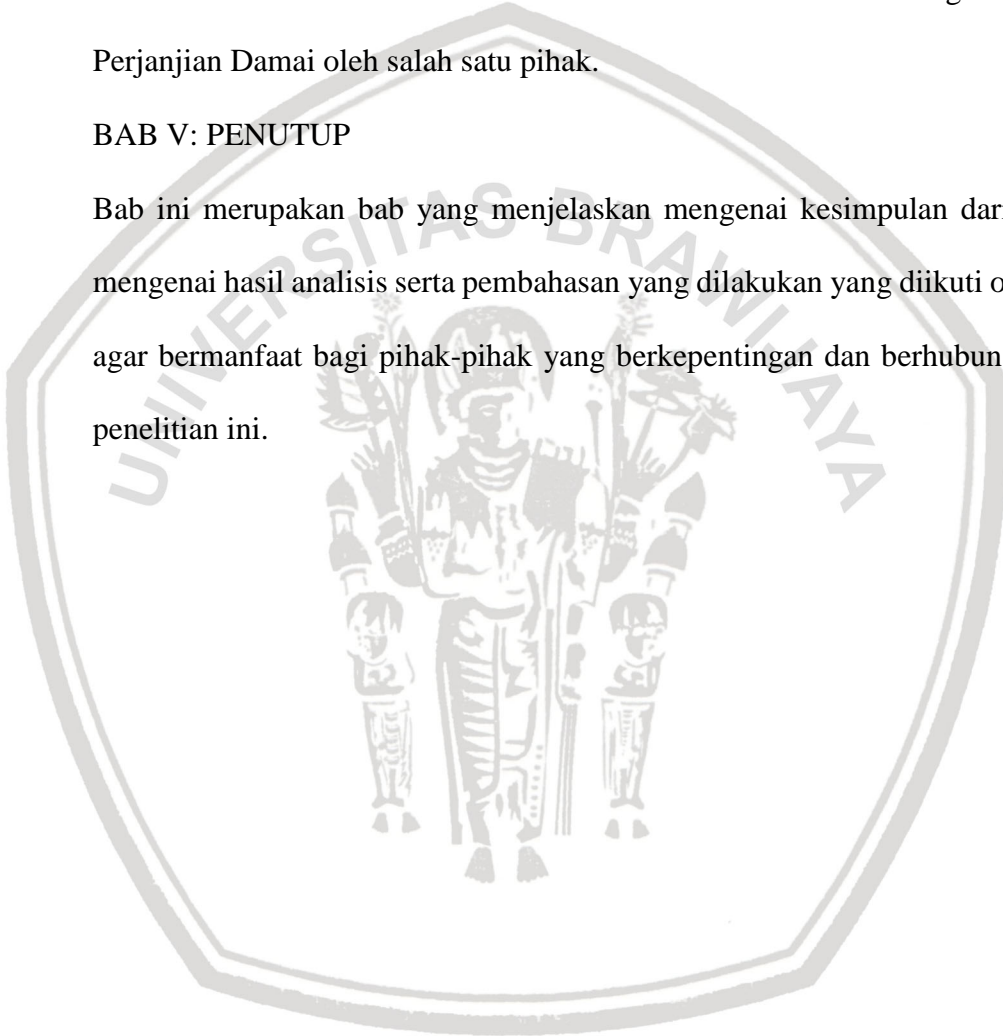
Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Penelusuran Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum

#### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh, dianalisa oleh peneliti serta dilakukan pengkajian mengenai permasalahan pada putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Nomor 010/P.BPSK/10/2017 dimana dalam hal ini tidak ditandatangani Surat Perjanjian Damai oleh salah satu pihak.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari peneliti mengenai hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan yang diikuti oleh saran agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berhubungan pada penelitian ini.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Teori tentang Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti dalam pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan kepastian hukum sesuai dengan yang berlaku dan bersifat baku. Menurut Gustav Radbruch, menjelaskan terkait kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat kepastian hukum bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Dalam hal ini, pada pelaksanaan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat haruslah jelas, teratur, konsisten, konsekuen, dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup>.

Menurut Gustav Radbruch, hukum haruslah mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*), meninjau dari sudut pandang yuridis
2. Asas Keadilan Hukum (*Gerechtigheit doelmatigheid*), meninjau dari sudut filosofis, keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan

---

<sup>1</sup> Dominikus Ratu, **Filsafat Hukum Mencari : Memaknai dan Memaha Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 60

3. Asas kemanfaatan hukum (wechmatigheid), meninjau dari segi kemanfaat berlakunya hukum di masyarakat<sup>2</sup>

Hukum menurut Hans Kelsen merupakan suatu sistem norma. Norma menurut Kelsen adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan mencantumkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah suatu produk dan juga aksi manusia. Undang-Undang dalam hal ini berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan dalam Undang-Undang merupakan pedoman sekaligus batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan atau berinteraksi terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum<sup>3</sup>.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam hal ini berarti sesuatu yang menjadi sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

---

<sup>2</sup> Ibid, hala. 61

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk<sup>4</sup>.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Kedua menjelaskan mengenai keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu<sup>5</sup>.

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa suatu hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian suatu aturan hukum<sup>6</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Teori Tentang Perjanjian**

Perjanjian Menurut Ahmadi Miru merupakan peristiwa hukum dimana seseorang melakukan janji kepada seseorang lain atau dua orang lain saling melakukan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Wirjono Prodjodikoro Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut harta benda dua pihak, dimana dalam hal ini suatu pihak berjanji untuk

---

<sup>4</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta, 2009, hal 385

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 24

<sup>6</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2005, hal 82-83

melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji yang telah dibuat<sup>7</sup>.

Dan perjanjian merupakan suatu yang kongkrit dan dapat diamati baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak kongkrit, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan<sup>8</sup>.

Pada pendapat Wirjono Prodjodikoro terdapat kekurangan pada isi perjanjian atau prestasi yang bias berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini Pendapat Wirjono Prodjodikoro tidak mencakup memberikan sesuatu. Perjanjian merupakan suatu yang abstrak, dimana merupakan suatu hubungan hukum yang bersumberkan pada Undang-Undang dan persetujuan perikatan yang bersumber pada perjanjian dan Undang-Undang perikatan bersumber dari undang-undang dapat dibagi menjadi dua, yaitu Undang-Undang saja dan dari Undang-Undang yang karenanya perbuatan manusia. Dalam hukum perjanjian terdapat banyak asas, diantaranya yaitu sebagai berikut,

1. Asas Konsensualisme, yaitu lahirnya suatu perjanjian dibutuhkan suatu kesepakatan. Dengan demikian apabila tercapat kesepakatan antara para pihak, lahirilah perjanjian walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada

---

<sup>7</sup> Ahmad Miru, **Hukum Kontrak Perancangan Kontrak**, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2010, hal 3

<sup>8</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Perjanjian**, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 5

saat kesepakatan dibuat. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak maka lahirlah suatu hak dan kewajiban bagi mereka yang membuat perjanjian atas dasar sepakat. Hal ini bersifat obligatoir, yaitu melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berkontrak, menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang atau aturan bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu dasar untuk menjamin seseorang dalam kebebasannya membuat suatu kontrak dalam perjanjian.
3. Asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), dimana dalam hal ini setiap orang yang membuat suatu perjanjian berlaku mengikat kepada para pihaknya untuk memenuhi suatu perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi oleh para pihak yang sifatnya seperti undang-undang. Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Asas Itikad baik (*Good Faith*), yaitu suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam hal ini kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan khusus yang diikat dengan Itikad baik.



Mengenai timbulnya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian terdapat empat teori<sup>9</sup>, yaitu

- a. Teori pernyataan (*uitingsheorie*), dimana kesepakatan terjadi pada saat pihak menerima penawaran itu menulis surat jawaban yang menyatakan bahwa pihak tersebut menerima penawaran yang telah dibuat.
- b. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), dimana kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima mengirimkan telegram, surat, atau *telex*. Menurut teori ini hanya dengan tanggal cap pos pada saat pengiriman jawaban penerimaan dipakai sebagai pegangan kapan saat lahirnya perjanjian.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan menurut teori ini terjadi apabila pihak yang menawarkan tersebut mengetahui adanya *acceptie* atau suatu penerimaan dalam bentuk tindakan. Akan tetapi, penerimaan tersebut tidak diketahui secara langsung oleh pihak yang menawarkan.
- d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan menurut teori ini merupakan suatu kesepakatan yang terjadi saat pihak yang memberikan tawaran menerima langsung jawaban dari pihak yang diberikan penawaran.

---

<sup>9</sup> R.Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta Bandung, Bandung, 2005, hal 59

Teori kesepakatan menurut Riduan Syahrani bahwa <sup>10</sup>,

“Sepakat mereka yang dalam mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian dan telah sepakat atau adanya persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

### C. Tinjauan Umum Teori Tentang Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidak adilan.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

## D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

### 1. Pengertian Mediasi

Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yng melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah<sup>11</sup>. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat<sup>12</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara Kemudian<sup>13</sup>.

pengertian mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat (7), yang menyebutkan bahwa Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

---

<sup>11</sup> John Echols dan Hasan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia**, Cet. ke xxv, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal 377

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal 640

<sup>13</sup> Subekti & Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal 414

suatu kesepakatan para pihak dengan campur tangan oleh mediator sebagai penengahnya.<sup>14</sup>

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut<sup>15</sup>:

- 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
- 2) Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan suatu kesepakatan yang diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketanya.

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)

---

<sup>14</sup> Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

<sup>15</sup> Suyut Margono, **ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum**, PT.Graha Indonesia, Bogor, 2011, hal 57.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, I. Rubini dan Chaidir Ali merumuskan Keputusan Hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim disebut Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya<sup>16</sup>. Sudikno Mertokusumo memberi batasan putusan hakim adalah suatu putusan yang dikeluarkan hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> I. Rubi dan Chaidir Ali, **Pengantar Hukum Acara Perdata**, Penerbit Alumni, Bandung 2003, hal 115

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal 165



Maka dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, yang dimaksud dengan putusan hakim pada hakikatnya adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa<sup>18</sup>.

## 2. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan putusan tidak dijelaskan maupun diuraikan dalam HIR maupun RBg, kecuali pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg yang hanya menjelaskan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdapat putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu<sup>19</sup>. Misalnya perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia**, PT Djambatan, Jakarta, 2008, hal 7

<sup>19</sup> *Ibid.*,

ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi) melawan putusan itu<sup>20</sup>. Jadi putusan itu tidak dapat diganggu gugat<sup>21</sup>. Dengan demikian, Putusan hakim yang bersifat final dan mengikat adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu dan memiliki kekuatan eksekutorial<sup>22</sup>.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan<sup>23</sup>.

- 1) Kekuatan mengikat Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai, dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka dalam hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa.
- 2) Kekuatan pembuktian, dituangkannya suatu putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin

---

<sup>20</sup> *Op.cit.*, hal 175

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 175-176

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Op.Cit.*, hal 201-203

diperlukan untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga.

- 3) Kekuatan *executorial*, dalam putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk melaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executorial* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata-kata, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada pada setiap putusan. Akan tetapi tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, hanya putusan *condemnatoir*<sup>24</sup> yang dapat dilaksanakan secara oleh pengadilan, sementara putusan *declaratoir*<sup>25</sup> dan *constitutif*<sup>26</sup> tidaklah memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dapat melaksanakannya.

---

<sup>24</sup> Putusan *condemnatoir* adalah suatu putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.

<sup>25</sup> Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi

<sup>26</sup> Putusan *constitutief* adalah yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.

## F. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen

Asal mula istilah “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda yaitu *consument*<sup>27</sup>. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Konsumen bisa juga diartikan sebagai consumer adalah lawan (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang<sup>28</sup>.

Pengertian Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>29</sup>”

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, pengertian konsumen dapat diuraikan menjadi tiga bagian, terdiri atas<sup>30</sup>:

- 1) Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan/atau jasa untuk tujuan tertentu
- 2) Konsumen antara adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya dengan satu tujuan koersial. Konsumen dengan Pelaku Usaha.

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 23

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2010, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 150

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>30</sup> Az. Nasution, **Aspek Hukum Perlindungan Konsumen**, Jurnal Teropong, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2006, hal 6-7

- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*natuurlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK tersebut. Dalam pengertian konsumen ini adalah syarat untuk tidak diperdagangkan, yang menunjukkan sebagai konsumen akhir (*end consumer*), dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*intermediate consumer*). Az.Nasution juga mengklasifikasikan pengertian Konsumen menjadi tiga bagian<sup>31</sup>:

- 1) Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
- 3) Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk

---

<sup>31</sup> Sembiring Sentosa, **Himpunan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait**, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal 89



diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK

## 2. Hak Konsumen

Hak-Hak Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 menyebutkan,

Hak konsumen dalam hal ini adalah,

- 1) Hak atas suatu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari suatu barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas suatu barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>32</sup>

### **3. Kewajiban Konsumen**

Kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan,

Kewajiban konsumen adalah<sup>33</sup>,

- 1) Membaca atau mengikuti suatu petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam hal melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati
- 4) Mengikuti dengan baik upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **G. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen

---

<sup>32</sup> Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>33</sup> *Ibid.*,

perantara)<sup>34</sup>. Dalam UUPK Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah,

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik dalam berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>35</sup>

Maka dalam hal ini pelaku usaha merupakan pihak badan usaha yang berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha dibidang perekonomian.

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Mengenai hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah<sup>36</sup>:

- (1) Hak untuk menerima suatu pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- (2) Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum pada sengketa konsumen
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila telah terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

---

<sup>34</sup> Sofie Yusuf, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya**, Citra Adytia, bandung, 2006, hal 80.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>36</sup> Pasal 6 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah<sup>37</sup>:

- (1) Beritikad baik dalam melakukan suatu kegiatan usahanya
- (2) Memberikan segala informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari suatu barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- (3) Memperlakukan atau melayani pihak konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu suatu barang dan/atau jasa yang berlaku
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi dari suatu barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- (6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 3. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19,20,21 UUPK antara lain :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi
- (4) Pemberian suatu ganti rugi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.



## H. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

### 1. Pengertian BPSK

BPSK merupakan suatu Badan atau lembaga *independent* yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan terkait kewajiban dari pelaku usaha<sup>38</sup>.

BPSK adalah lembaga yang memeriksa sengketa konsumen, yang bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan. BPSK tidak menyelesaikan sengketa konsumen dengan jalan damai, tetapi memeriksa sengketa berdasarkan hukum. Artinya, BPSK dalam menjalankan perannya dalam penyelesaian sengketa tetap berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Zainul Akhyar, **Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin**. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015, hal 774

<sup>39</sup> Hanum Rahmaniar Helmi, **Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia**, JHAPER: Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2015 hal 89

## 2. Tugas Dan Wewenang BPSK

Tugas dan wewenang BPSK sesuai dengan UUPK dan Kepmen Perindag No. 350<sup>40</sup>

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- 7) Memanggil pihak pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK

---

<sup>40</sup> Maslihati Nur Hidayati, **Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Tentang Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen**, Lex Jurnalica Vol.5 No. 3, Agustus 2008 hal 174

- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK
- 10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian pada pihak konsumen
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

### **3. Sengketa Konsumen Yang Menjadi Wewenang BPSK**

Terkait dalam penyelesaian sengketa, yang menjadi “kewenangan BPSK itu sendiri adalah,

- 1) Dari Sisi Pengadu : Penggugat harus konsumen akhir, Gugatan *Class Action* tidak dapat diterima
- 2) Dari sisi yang diadukan : Tergugat adalah Pelaku Usaha, orang, Badan Usaha, BUMD dan BUMN
- 3) Dari sisi Objek Barang dan/atau jasa : Objek sengketa, Barang dan/atau Jasa yang dapat diperdagangkan secara sah menurut UU
- 4) Dari sisi Tuntutan Ganti Rugi : Tuntutan Ganti-Rugi *Im-material* tidak dapat diterima

- 5) Dari sisi Parameter Yang dilarang : Pelaku Usaha melanggar parameter perbuatan yang dilarang oleh UUPK.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan penerapannya<sup>1</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik data primer maupun sekunder.<sup>2</sup>

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>3</sup>.

Adapun di dalam penelitian ini maka peneliti melakukan studi-studi kepustakaan terkait Perundang-Undangan yang terkait dengan tinjauan yuridis mengenai kekuatan hukum putusan BPSK No 011/P.BPSK/10/2017 apabila Surat

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hal 295

<sup>2</sup> Dyah Ochtorina Susanti, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 19

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 13-14.



Perjanjian Damai dengan cara mediasi salah satu pihak tidak menandatangani surat tersebut, maupun studi terhadap literatur-literatur terkait, guna menemukan solusi mengenai konflik hukum yang terjadi terhadap kekuatan hukum pada Putusan BPSK No 011/P.BPSK/10/2017 apabila tidak ditandatanganinya Surat Perjanjian Damai.

## **B. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan menurut Peter Marzuki adalah Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani atau dibahas.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif ini memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Dalam hal ini kekuatan hukum pada akta perdamaian yang berasal dari Surat Perjanjian Perdamaian dengan cara Mediasi yang tidak ditandatangani oleh salah satu pihak berperkara.

### **2. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analisis dalam penelitian ini lebih mengarah dan menganalisis surat perjanjian damai hasil mediasi dikaitkan pada isi putusan dan peraturan perundang-undangan yang terkait pada kasus yang

akan diteliti. Dalam hal ini juga, lebih mengkaitkan pada perundang-undangan yang berlaku dan terkait pada isu hukum yang dikaji.

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan konseptual, maka peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan di dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin hukum yang dikemukakan mengenai hal kasus yang akan dibahas.

Hal tersebut dilakukan dikarenakan belum ditemukannya hukum terhadap permasalahan hukum yang terjadi, terkait kekuatan hukum pada putusan BPSK yang berasal dari Surat Perjanjian Perdamaian dengan cara Mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK tidak ditandatangani oleh salah satu pihak yang berperkara, sehingga padangan para ahli hukum maupun doktrin tersebut sangat penting guna menghasilkan argumentasi hukum demi tercapainya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pada kasus ini menggunakan kasus pada surat perjanjian perdamaian dan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK yaitu Surat Perjanjian Damai dengan cara Mediasi 011/SPD.BPSK/10/2017 dan Putusan Nomor 011/P.BPSK/10/2017.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dirumuskan dan disahkan oleh pemerintah yang kemudian dijalankan sebagai sebuah peraturan.<sup>4</sup>

Di dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai kekuatan hukum pada putusan hasil mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK, yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
- d. Keputusan Presiden No.90/ 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.302 MPP/Kep./10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

---

<sup>4</sup> *Op.Cit*, hal 47

- f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep./12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- g. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 40/PDN/02/2010 Tahun 2010
- h. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 011/P.BPSK/10/2017

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum terkait yang merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 605/MPP/Kep./8/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep./12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan juga dapat berupa buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para ahli (doktrin) yang terkait dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini guna mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini yang didapatkan dari:

- a. Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2. Akses Internet

Selain menggunakan studi kepustakaan, bahan hukum di dalam penelitian ini juga diperoleh dari akses situs-situs website yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai substansinya dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga dapat menunjang bahan-bahan hukum penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Di dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengolahan data pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap



bahan-bahan hukum tertulis untuk mempermudah dalam pengerjaan analisis maupun kontruksi<sup>5</sup>.

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Kegiatan yang dilakukan di dalam teknik analisis tersebut diantaranya adalah:

1. Mengumpulkan seluruh bahan hukum yang digunakan, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Di dala bahan hukum primer, analisis yang dilakukan adalah menelaah dan menggunakan pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut yang terkait dengan putusan Nomor: 011/P.BPSK/10/2017 dan Surat Perjanjian Damai dengan Cara Mediasi Nomor 011/SPD.BPSK/07/2017 yang dikeluarkan oleh BPSK. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, analisis yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia hukum, kamus-kamus hukum maupun doktrin para ahli.
2. Mengolah dan mengidentifikasi bahan hukum yang telah dikumpulkan.
  - a. Pada bahan primer, penulis menggunakan analisis terhadap undang-undang terkait yang bersangkutan dengan kekuatan hukum dari

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 36

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal 29

kekuatan Hukum Putusan BPSK apabila tidak ditandatanganinya Surat Perjanjian Damai oleh Salah Satu Pihak.

- b. Pada bahan sekunder, penulis menggunakan teknik analisis terhadap sumber-sumber buku, jurnal, kamus, maupun ensiklopedia dan doktrin hukum sehingga dapat menjadi penunjang bagi penelitian terhadap sumber hukum primer.

#### **F. Definisi Konseptual**

1. Kekuatan Hukum adalah suatu sifat atau kekuatan yang ada pada putusan BPSK yang tidak ditandatanganinya Surat Perjanjian Damai pada penyelesaian sengketa BPSK.
2. Surat Kesepakatan Perjanjian adalah dalam hal ini disamakan dengan Surat Perjanjian Damai dengan Cara Mediasi pada BPSK yang merupakan hasil mediasi yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani para pihak
3. Putusan BPSK adalah putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dan bersifat final dan mengikat.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kekuatan Hukum Putusan Hasil Mediasi No.011/P.BPSK/10/2017 Yang Dikeluarkan Oleh BPSK Apabila Salah Satu Pihak Tidak Menandatangani Surat Perjanjian Damai

##### 1. Kedudukan BPSK

Sebagai sebuah sistem, penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen tidak akan terlepas dari konteks pembangunan nasional. Adanya konsep keterpaduan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Hal tersebut berdasarkan pada konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang lebih membahas konteks pembangunan nasional yang lebih kearah kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dimana pembangunan nasional yang diharapkan sesuai dengan konsep Kesejahteraan (*Welfare State*)<sup>1</sup>.

Kesejahteraan, Negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat banyak. Negara perlu melakukan intervensi<sup>2</sup> dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Paham ini yang

---

<sup>1</sup> Rahmat Sudraja, 2015, **Mengurai Independensi dan Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**, diakses pada hari minggu, tanggal 8/4/2018 pukul 19.28

<sup>2</sup> campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya), Diakses pada hari Selasa, pada tanggal 1/2/2018, pukul 20.32

menempatkan negara yang memiliki peran dan tugas konstitusional untuk melindungi warga Negaranya<sup>3</sup>.

Apabila ditinjau dari segi peradilan umum, yang termuat pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui lembaga-lembaga peradilan, yaitu Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi<sup>4</sup>. Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman lebih lengkapnya berada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ruang Lingkup pada BPSK berada pada Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini dibawah Mahkamah Agung pada Lingkup Peradilan umum yang berkaita dengan BPSK, Peradilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat dalam mencari suatu keadilan pada umumnya<sup>5</sup>. Peradilan umum memiliki keterkaitan dengan BPSK dalam proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dan (4), Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, **Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran**. Nusa Media, Bandung, 2008, hal 34

<sup>4</sup> Bagir Manan, **Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)**, Mahkamah Agung RI, jakarta, 2004, hal 25

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, **Peradilan Satu Atap di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 15



Konsumen. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Ada 4 hubungan keterkaitan BPSK dengan lingkungan peradilan umum berdasarkan proses penyelesaiannya, yaitu<sup>6</sup>,

- a. Para pihak yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri,<sup>7</sup> dan selanjutnya jika para pihak masih keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan pada Pengadilan Negeri, dan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>8</sup>
- b. Apabila pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan kewajibannya, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>9</sup>
- c. Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri di tempat konsumen dirugikan.<sup>10</sup>
- d. Upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa selanjutnya gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, BPSK merupakan lingkup peradilan umum dan juga Mahkamah Agung. Karena dalam hal ini apabila pada lingkup peradilan

---

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**, Mandar maju, Bandung, 1989, hal 10

<sup>7</sup> Pasal 56 Ayat (2) UUPK jo. Pasal 41 Ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001

<sup>8</sup> Pasal 58 Ayat (2) UUPK

<sup>9</sup> Pasal 56 Ayat (4) UUPK jo. Pasal 41 Ayat (6) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001

<sup>10</sup> Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 Ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001

<sup>11</sup> Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

umum telah diuraikan oleh penulis sebagaimana dapat dilihat di atas bahwa BPSK memiliki empat keterkaitan pada peradilan umum.

Beralih pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen dan lembaga yang membantu dalam penyelesaian sengketa pada konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (*small claim court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan<sup>12</sup>.

Maka dalam hal ini, kedudukan BPSK pada lingkup peradilan umum di Pengadilan Negeri dan di bawah Mahkamah Agung karena dalam hal melakukan upaya keberatan pada putusan BPSK dapat melakukan upaya Banding dan kasasi.

**a. Kekuatan Hukum Surat Perjanjian Damai pada BPSK**

Surat perjanjian damai dengan cara mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK ini merupakan pengesahan terhadap para pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi<sup>13</sup>, para pihak sepakat membuat perjanjian tertulis, dan pada saat itu perjanjian ditandatangani oleh para pihak, maka sejak saat itu pula mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa mereka sepakat

---

<sup>12</sup> Pasal 49 ayat (1) UUPK

<sup>13</sup> Nurmadjito, **Pengaturan Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 25

mengikatkan dirinya dan juga sesuai pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata antara lain yaitu semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dengan perkataan lain mengikat para pihak bagaikan Undang-Undang.

Pada surat perjanjian damai juga berlaku asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas kepastian hukum pada perjanjian. Dimana para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum. Dalam asas *Pacta Sunt Servanda* berlaku bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya apabila perjanjian yang dibuat secara sepakat menuangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis<sup>14</sup>.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum dari surat perjanjian damai dikaitkan dengan pasal dalam perundang-undangan serta asas yang berlaku pada perjanjian adalah berlaku mengikat para pihak yang membuatnya dan sepakat dalam membuat perjanjian tersebut. Apabila tidak dilaksanakan maka dapat dilakukan penuntutan atau suatu gugatan karena salah satu pihak tidak melaksanakan dari ketentuan suatu perjanjian perdamaian yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**b. Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh BPSK**

Keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam peradilan kecil (*small claim court*) yang diatur pada

---

<sup>14</sup> *Pacta Sunt Servanda* diakses pada hari Selasa, tanggal 24/04/2018 pukul 20.12

Pasal 49 ayat (1) UUPK merupakan penerapan yang digunakan untuk pemerataan keadilan, khususnya konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh pelaku usaha. Dimana dalam hal ini konsumen tingkat akhir yaitu yang mengonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha<sup>15</sup>. Dalam permasalahan kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terkadang terhitung nominal kerugiannya yang kecil sehingga dengan tidak memungkinkan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri karena tidak sebanding dengan biaya perkara yang akan dikeluarkan<sup>16</sup>. Terbentuknya suatu lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara cepat, mudah dan biaya ringan. Cepat karena dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK harus sudah diputus atau diselesaikan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlamban atau memperlama proses penyelesaian perkara<sup>17</sup>. Mudah karena dalam prosedurnya administratif dan proses penjatuhan putusan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum atau pengacara. Biaya ringan karena biaya termasuk murah dalam melakukan persidangan yang dibebankan kepada pihak dapat dijangkau<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 UUPK

<sup>16</sup> J. Widjiantoro dan Al Wisnubroto, **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cetakan Pertama**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 256

<sup>17</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Edisi Pertama PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 278

<sup>18</sup> Yusuf Shofie dan Somi Awan, **Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2004, hal 95-96

Apabila dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) KEPMEN 350 bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Dalam hal ini para pihak harus menyatakan berdasarkan itikad baik menjalankan suatu hal-hal yang telah disepakati. Dalam peraturan ini menjelaskan apabila suatu putusan dapat memiliki kekuatan eksekutorial, maka putusan tersebut dapat diajukan atau dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri<sup>19</sup>.

Apabila membahas dalam UUPK terkait kekuatan hukum Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK memiliki kontradiktif. Dikaitkan kembali pada ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan “bahwa putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun didalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat 1 KEPMEN 350 yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan selesai di BPSK, sedangkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk

---

<sup>19</sup> Jimmy Joses Sembiring, **Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan**, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010, hal 197



menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Jadi dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap ini memiliki tiga macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi.

Pasal 42 ayat 1 KEPMEN 350, yang dijelaskan Gary Goodpaster yang mengatakan bahwa, dalam ajudikasi<sup>20</sup> para pihak melepaskan hak mereka untuk memutuskan sengketa mereka sendiri dan sebagai gantinya mempercayakan kepada ajudikator<sup>21</sup>. Tetapi dalam mediasi penyelesaian sengketa ditentukan oleh kesepakatan para pihak sendiri, mediator sebagai pihak ketiga hanya membantu para pihak merundingkan suatu perjanjian, tetapi tidak membuat putusan yang bersifat substantif bagi penyelesaian sengketa. Adapun konsiliator di dalam penyelesaian sengketa juga memberikan putusan, hanya saja putusan tersebut tidak mengikat para pihak yang bersengketa, sebagaimana dengan putusan arbitrator.

Pada dasarnya putusan Majelis BPSK dibedakan atas dua jenis putusan hasil penyelesaian di BPSK, yaitu putusan BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang membedakan dari kedua putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi putusan, putusan BPSK dengan

---

<sup>20</sup> Ajudikasi adalah upaya hukum penyelesaian dalam jalur hukum atau pengadilan.

<sup>21</sup> Inosentrus Samsul, **Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Multak**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal 46

cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya suatu perkara dan pertimbangan hukumnya. Sementara itu, putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan adalah semata-mata berdasarkan atas surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) KEPMEN 350 yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir atau selesai di BPSK, dan tidak boleh dilakukan upaya hukum oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Prinsip *res judicata vitate habetur* (suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum selanjutnya) dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Berdasarkan prinsip demikian putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut masih belum final. Pihak yang keberatan atas putusan yang didapat untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding akan tetapi para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan produknya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata

Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Peraturan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK kecuali yang memenuhi persyaratan. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap putusan arbitrase.

Putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK menyampingkan campur tangan yang luas dari pihak peradilan umum. Apabila dikaitkan dengan kekuatan putusan BPSK, maka dapat diketahui bahwa terdapat suatu ketidakpastian hukum dari beberapa ketentuan dalam UUPK dan KEPMEN 350, dimana dalam hal ini konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Ketentuan dalam Pasal ini membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan putusan BPSK. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

c. **Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dikeluarkan Oleh BPSK**

Sengketa yang terjadi diantara para pihak umumnya merupakan sengketa sosial. Sengketa sosial dapat terjadi apabila keinginan dari salah satu pihak berbenturan dengan keinginan pihak yang lain. Apabila dalam hal ini permasalahan dan sengketa sosial itu merupakan perbedaan ruang lingkup tatanan hukum, maka akan menjadi sengketa hukum<sup>22</sup>. Terhadap sengketa yang timbul pada umumnya, para pihak yang bersengketa lebih tertarik menyelesaikan sengketanya sendiri melalui jalan musyawarah dengan para pihak yang bersangkutan tanpa melalui bantuan pihak ketiga. Akan tetapi dalam hal ini terkadang sulit menemukan titik terang dalam suatu permasalahan yang terjadi<sup>23</sup>.

Permasalahan yang tidak berujung damai hingga akhirnya harus dibawa ke pengadilan, dimana di pengadilan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. dalam hal ini BPSK merupakan lembaga non litigasi akan tetapi bertindak seakan akan seperti pengadilan. Pada prinsipnya para pihak yang berselisih menghendaki penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya ringan<sup>24</sup>. Pada BPSK menerapkan proses penyelesaian sengketa cepat, sederhana dan biaya ringan. Terkait dengan penyelesaian sengketa menggunakan Alternative dispute Resolution (ADR). Dimana dalam hal

---

<sup>22</sup> Rahmadi Putra Paputungan, **Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata**, Lex Crimen Vol. Vi/No. 8/Okt/2017 hal 20

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap. **Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal 162

<sup>24</sup> Mertokusumo, **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya, Jakarta, 1992, hal 59

ini membahas mengenai Mediasi pada proses penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK.

Penyelesaian perdamaian telah diatur dalam Hukum Perdata baik litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa terkait permasalahan pemenuhan kewajiban secara non litigasi dengan perdamaian telah diakui dan diatur sejak lama dalam KUHPerdata dalam Pasal 1851 KUHPerdata. Pada ketentuan yang diatur Pasal 1851 KUHPerdata menyebutkan suatu perdamaian itu harus dibuat secara tertulis. Dalam praktiknya di lingkup masyarakat, bentuk tertulis itu dibuat dalam akta perdamaian baik dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan<sup>25</sup>.

Mengenai pengertian Akta perdamaian menurut Pasal 1 angka 10 PERMA No.1 Tahun 2016 Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian. Dikaitkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu HIR/Rbg, Terkait Akta perdamaian diatur pada Pasal 130 Herzien Indonesis Reglement HIR maupun pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Dalam ketentuan ini mengamanatkan agar mendorong para pihak menempuh proses perdamaian terlebih dahulu. Kewajiban hakim mengusahakan suatu perdamaian sebelum pemeriksaan perdata merupakan hal yang harus dilakukan dalam proses hukum acara

---

<sup>25</sup> Rilda Murniati, **Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi**, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hal 90



perdata di pengadilan. ketentuan ini didasari pada Pasal 130 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:

“Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak dating, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dianalisis dan diketahui bahwa apabila kedua belah pihak dating pada hari sidang yang telah ditentukan, maka hakim akan melakukan usaha perdamaian terlebih dahulu. Dalam pasal ini hanya menyebutkan suatu usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016)<sup>26</sup>. Usaha perdamaian ini adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (procesverbaal)<sup>27</sup>. Suatu pemeriksaan perkara tanpa didahului dengan usaha perdamaian maka sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal demi hukum<sup>28</sup>.

Apabila majelis hakim dapat berhasil mendamaikan para pihak yang sedang berperkara, menurut Pasal 130 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa :

*“Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.”*

---

<sup>26</sup> Moh. Taufik Makaro, **Pokok-pokok Hukum Acara Perdata**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 61

<sup>27</sup> Mochammad Dja'is, RMJ. Koosmargono, **Membaca dan Mengerti HIR**, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2010, hal 43-44

<sup>28</sup> Riko Kurnia Putra, Moch Djais, Marjo, **Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/Pn Smg, Diponegoro Law Journal** Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal 3

Dalam hal ini dapat diketahui dan dianalisis, apabila suatu penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak mencapai perdamaian, maka dalam hal ini harus dibuat akta perdamaian yang berisi untuk menghukum para pihak untuk melaksanakan persetujuannya. Dan dalam ketentuan ini, kekuatan hukum dari akta perdamaian tersebut berkekuatan tetap seperti putusan hakim biasa. Dalam hal mediasi yang telah tercapai perdamaian, hakim menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan persetujuannya<sup>29</sup>.

Dikaitkan dengan peraturan dasar Hukum Perdata pada KUHPerdata juga memberikan pernyataan bahwa kekuatan hukum dari Akta Perdamaian itu sendiri. Pada Pasal 1858 KUHPerdata menyebutkan bahwa Dalam hal ini menurut Pasal 1858 mengenai akta perdamaian adalah :

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan yang sama halnya dengan putusan Hakim pada tingkat akhir. Dimana dalam hal ini bahwa akta perdamaian memiliki sifat yang sama dengan putusan hakim yaitu tidak dapat disangkal atau dibantah dengan alasan

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, S.H., **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007), Hal 312

telah terjadi kekeliruan hukum atau alasan salah satu pihak merasa dirugikan dengan akta perdamaian tersebut.

Kembali pada Peraturan Hukum Acara Perdata pada HIR Pasal 130 ayat (3) yang menyebutkan

“Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.”

Dapat ditarik kesimpulan terkait penjabaran dan penjelasan dari pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas bahwa akta perdamaian dalam hal ini disamakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana dalam hal ini tidak dapat diajukan upaya banding dan kasasi tetapi dalam hal ini berlaku pada upaya penyelesaian perdamaian pada pengadilan atau jalur litigasi.

Maka dalam hal ini, Kekuatan Akta Perdamain yang dikeluarkan oleh BPSK dapat dikaitkan dengan beberapa peraturan dan ketentuan yang telah berlaku terkait Akta Perdamaian di Pengadilan. Maka dalam hal ini kekuatan Hukum pada Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh BPSK memiliki kekuatan yang mengikat dan tidak dapat diajukan upaya banding.

## **2. Kronologi Kasus**

### **2.1 Kasus Posisi**

1. Putusan Nomor 011./P.BPSK/10/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Majelis BPSK Kota Malang yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sebagai berikut:

a. Para Pihak

Waris Antoro, Dusun Ledok RT 01 RW 05 Desa Kemirisewu Kec. Pandaan Kab Pasuruan adalah **sebagai PENGADU**

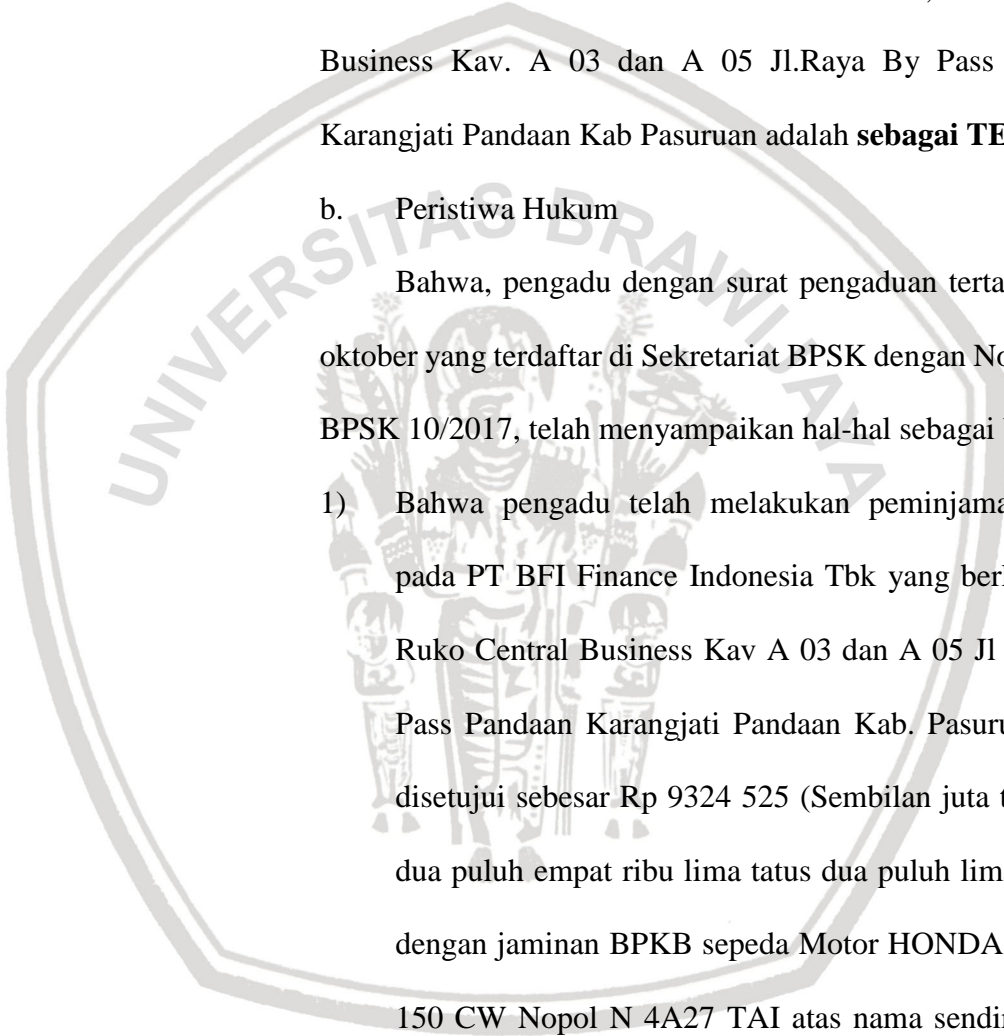
Melawan

PT BFI Finance Indonesia Tbk Pandaan, Ruko Central Business Kav. A 03 dan A 05 Jl.Raya By Pass Pandaan Karangjati Pandaan Kab Pasuruan adalah **sebagai TERADU**.

b. Peristiwa Hukum

Bahwa, pengadu dengan surat pengaduan tertanggal 05 oktober yang terdaftar di Sekretariat BPSK dengan No. 018/FP BPSK 10/2017, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pengadu telah melakukan peminjaman kredit pada PT BFI Finance Indonesia Tbk yang berkantor di Ruko Central Business Kav A 03 dan A 05 Jl Raya By Pass Pandaan Karangjati Pandaan Kab. Pasuruan telah disetujui sebesar Rp 9324 525 (Sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda Motor HONDA VERZA 150 CW Nopol N 4A27 TAI atas nama sendiri (Waris Antoro) dengan jangka waktu angsuran 12 bulan dihitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 dengan angsuran per bulan



sebesar Rp 959.000,- (Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

- 2) Bahwa pengadu pada angsuran ke 4 belum bisa membayar jatuh tempo tanggal 10 Mei 2017
- 3) Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017, 2 orang petugas dari PT BFI Finance Indonesia Tbk Pandaan mengambil barang jaminan berupa sepeda motor HONDA VERZA 150 CW Nopol N 4427 TAI atas nama Waris Antoro 4 Bahwa pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk Pandaan meminta pelunasan atas kekurangan angsuran dan denda
- 4) Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir dan memilih proses penyelesaian secara Mediasi.
- 5) Bahwa terhadap pengaduan pengadu, pihak Teradu telah memberikan konfirmasinya sebagai berikut:
  - a. Pengadu merasa keberatan jika harus melunasi kekurangan angsuran selama 9 bulan ditambah denda dengan total nominal Rp. 11.322.500 (Sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - b. Pengadu mampu membayar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan meminta jangka waktu maksimal 2 bulan dari tanggal hari ini



c. Dari pihak Teradu PT BFI Finance Indonesia Tbk Pandaan menyampaikan bahwa keputusan manajemen pelunasan harus selesai paling lama 2 minggu (akhir bulan Oktober 2017) karena sampai akhir bulan harus sudah clear

d. Pengadu menawarkan pelunasan paling lambat 1 bulan dan disetujui pihak Teradu:

c. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

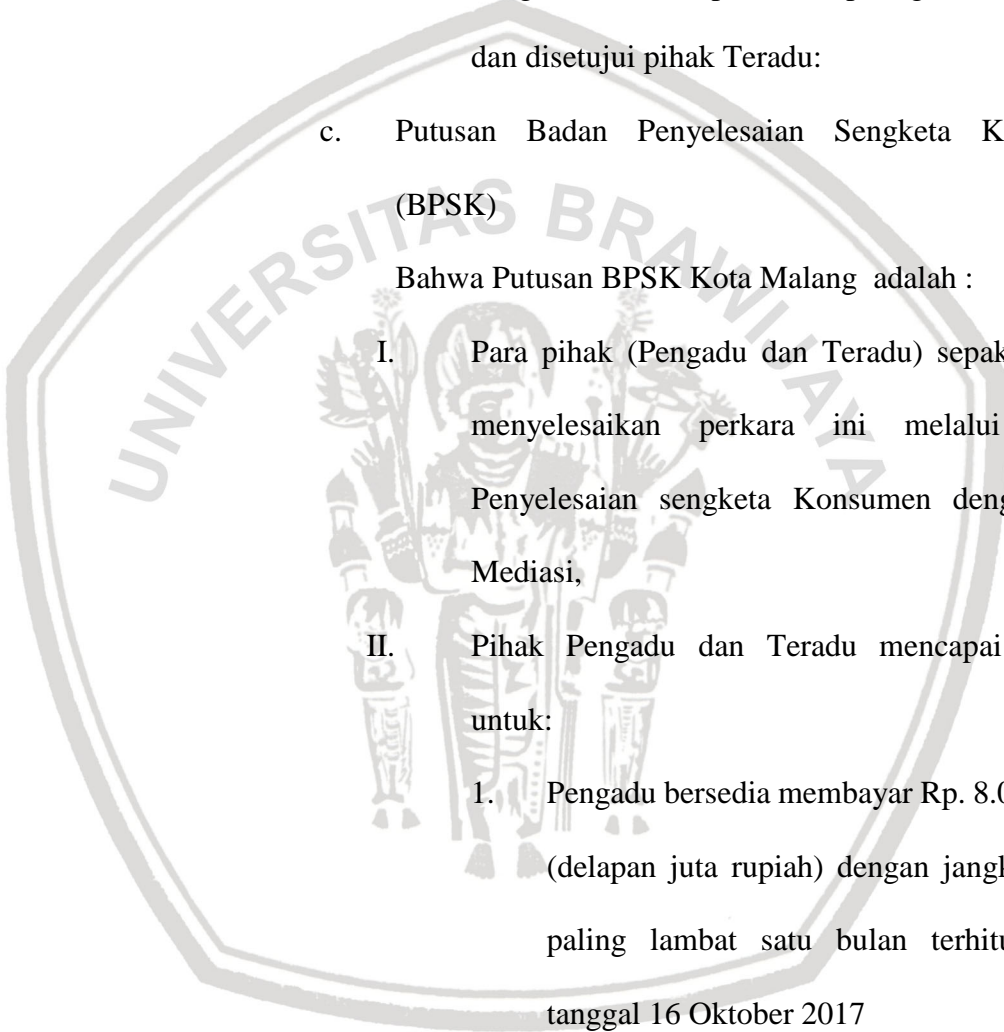
Bahwa Putusan BPSK Kota Malang adalah :

I. Para pihak (Pengadu dan Teradu) sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Mediasi,

II. Pihak Pengadu dan Teradu mencapai sepakat untuk:

1. Pengadu bersedia membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jangka waktu paling lambat satu bulan terhitung dari tanggal 16 Oktober 2017

2. Apabila pihak pengadu tidak dapat membayar sampai dengan waktu yang telah



ditentukan maka pihak Teradu berhak melelang barang jaminan.

- III. Putusan Majelis bersifat final dan mengikat
- IV. Apabila para pihak tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dictum IV dianggap menerima putusan BPSK.

Pada kronolgi Kasus Waris Antoro adalah selaku peminjam kredit sekaligus pihak pengadu pada pimpinan PT. BFI Finance Indonesia TBK yang berkantor di Ruko Central Business KAV A 03 dan A 05 Jl. RAYA By Pass Pandaan, Karangjati Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan selaku pihak teradu. Pihak pengadu yaitu Waris Antoro melakukan pengaduan pada Lembaga BPSK terkait kasus yang telah dijelaskan di atas. Dimana BPSK menurut UUPK dan KEPMEN 350 badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan atau non litigasi<sup>30</sup>, ketentuan juga diatur pada pasal 47 UUPK yang menyebutkan bahwa:

“Penyelesain sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen”.

Dimana pengajuan penyelesaian sengketa konsumen didasari pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa,

---

<sup>30</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, 2007, hal 143

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.”

Dan juga disebutkan pada pasal 45 ayat (2) UUPK,

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Terkait hal ini, Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai sesungguhnya yang paling diinginkan. Diusahakannya pembentukan penyelesaian sengketa yang mudah dan relative lebih cepat dengan dibentuknya Lembaga BPSK. Proses penyelesaian sengketa pada lembaga BPSK menggunakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Proses yang diterapkan pada lembaga BPSK diadopsi dari model *Small Claim Tribunal (SCT)*<sup>31</sup> yang telah berjalan secara efektif di Negara-negara maju, namun BPSK ternyata tidak serupa dengan *SCT*. Sebagaimana diketahui *SCT* berasal dari negara-negara yang bertradisi atau menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*, dimana menggunakan cara Yurisprudensi menjadi hal utama dalam penegakan hukum. Sedangkan Indonesia tradisi atau sistem hukumnya adalah *Civil Law* atau *Eropa Kontinental* yang bersumber dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan)<sup>32</sup>. BPSK nampaknya didesain dengan memadukan kedua sistem hukum tersebut,

---

<sup>31</sup> Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara Pertimbangan untuk mendapatkan nasihat hukum independen tentang opsi apa yang tersedia untuk menyesuaikan dengan keadaan Anda, diakses pada hari minggu, tanggal 06/5/2018 pukul 20.35

<sup>32</sup> Widiyantoro, J dan Wisnubroto Al, **Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen**, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hal 53

dimana model *SCT* diadaptasikan dengan model pengadilan dan model *ADR* (*Alternative Dispute Resolution*) khas Indonesia. Hal ini nampak misalnya dari konsep BPSK yang berdasarkan UUPK merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam proses penyelesaian perkara diatur dengan hukum acara yang amat prosed seperti hukum acara perdata di Pengadilan Negeri<sup>33</sup>.

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli<sup>34</sup>. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Alternative Dispute Resolution* merupakan suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan<sup>35</sup>. Proses penyelesaian sengketa Konsumen pada BPSK diatur pada KEPMEN 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

<sup>33</sup> Susanti Adi Nugroho, **Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya**, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 4

<sup>34</sup> Susanti Adi Nugroho, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2011, hal 5

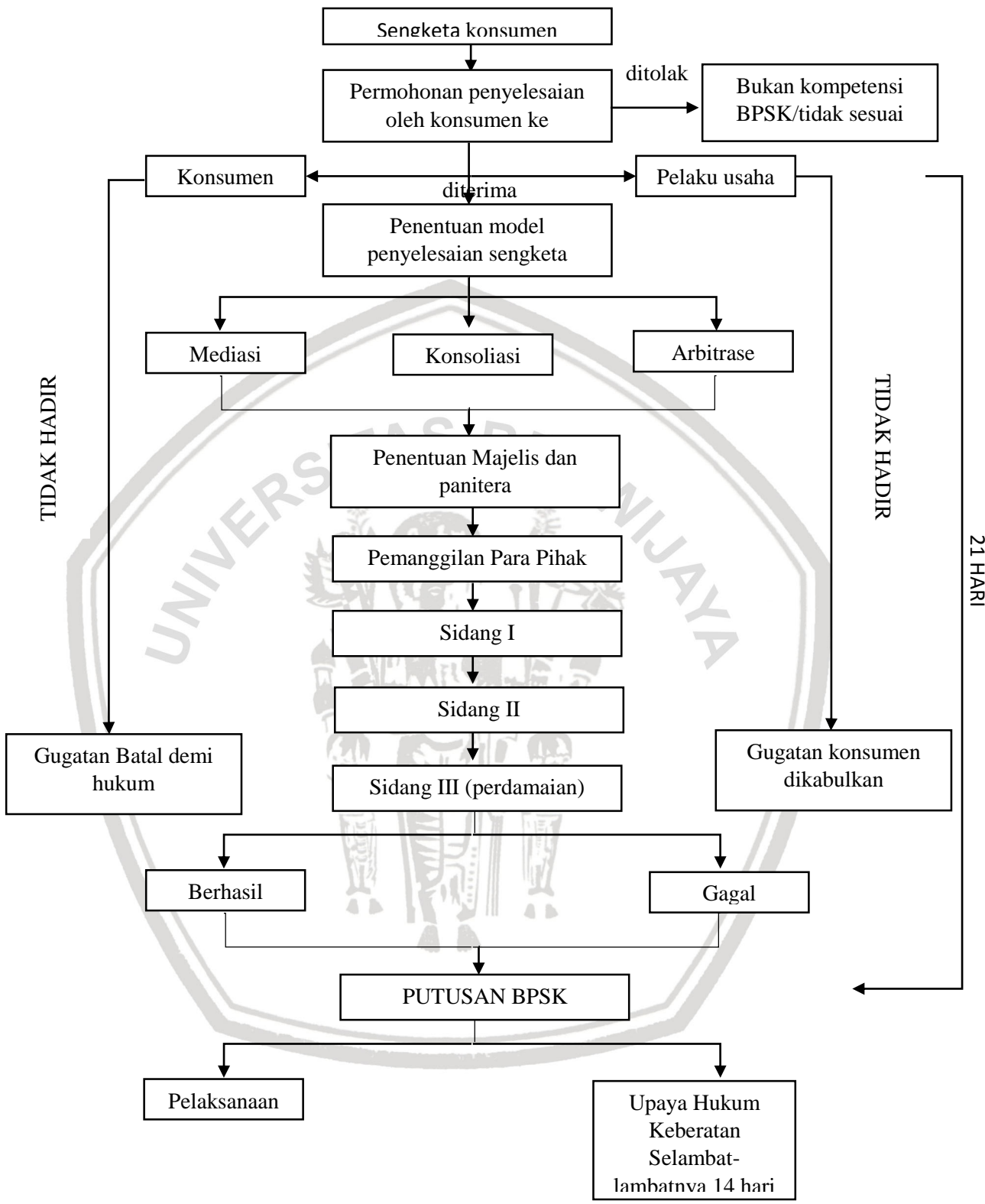
<sup>35</sup> Susanti Adi Nugroho, **Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya**, Prenada, Jakarta, 2015, hal 4

Penyelesaian sengketa Konsumen diatur pada pasal 15 sampai pasal 43 Kepmen perindag tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK. Apabila dijadikan bagan pada proses penyelesaian sengketa di BPSK secara umum, maka dapat diketahui sebagai berikut, yaitu





Skema 4.1 : Bagan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut KEPMEN 350



Sumber: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350, Wawancara dengan Hakim BPSK Malang, diolah oleh Penulis tahun 2018

Penjelasan dari bagan di atas yaitu Penyelesaian sengketa pada BPSK menurut KEPMEN 350 dan hasil wawancara dari salah satu majelis BPSK, penyelesaian sengketa dilakukan apabila telah terjadi adanya permohonan atau pengaduan dari pihak konsumen akhir, permohonan diajukan pada sekretariat BPSK. Ketua BPSK menentukan diterima atau tidaknya permohonan sesuai dengan kompetensi dari BPSK sesuai dengan ketentuan UU. Apabila permohonan diterima, maka BPSK segera menentukan Majelis dan Panitera, pemanggilan para pihak agar diselesaikan dalam bentuk Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase. Apabila telah menentukan bentuk penyelesaian, maka dilakukannya penyelesaian sengketa para pihak pemohon dan termohon hingga sampai suatu kesepakatan atau perdamaian dalam waktu 21 hari. Setelah kesepakatan dibuat, maka dibuatkan suatu Putusan oleh BPSK. dalam jangka waktu 14 hari, para pihak diberikan waktu untuk melakukan upaya keberatan pada PN untuk upaya hukum keberatan. Apabila tidak, maka langsung pada pelaksanaan putusan BPSK. apabila para pihak tidak mematuhi, maka BPSK dapat mengadukan telah melakukan kriminalisasi dan diajukan pada Pengadilan Negeri untuk upaya hukum selanjutnya.

Terkait pada Upaya Keberatan, Upaya keberatan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan didalam UUPK dan KEPMEN 350. Selanjutnya, Apabila upaya hukum keberatan yang

telah diajukan ke Pengadilan Negeri masih dimungkinkan upaya keberatan kembali, maka dapat diajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung.

Penyelesaian Sengketa Konsumen pada BPSK terdapat tiga model yaitu Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila mediasi yaitu proses penyelesaian mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif dalam penyelesaian sengketa mediasi untuk dijadikan sebagai mediator. Dalam hal ini majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, saran dan upaya-upaya lainnya dalam menyelesaikan sengketa. apabila Konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis BPSK yang bertindak pasif dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam penyelesaian sengketa mediasi dan konsiliasi apabila salah satu pihak tidak menyetujui putusan BPSK, tidak disediakan upaya keberatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Maka dalam hal ini, para pihak mengajukan gugatan ulang seperti perkara perdata biasanya.

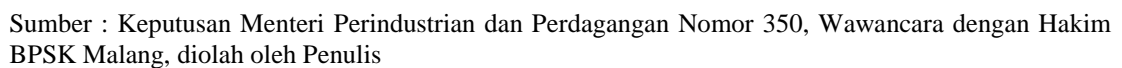
Apabila penyelesaian secara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis hakim BPSK yang bertindak selaku arbiter dalam penyelesaian sengketa tersebut. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui hasil putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, maka Mahkamah Agung menyiapkan PERMA No.1 Tahun 2006 dalam melakukan upaya keberatan

terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Dalam upaya keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana pengadilan negeri menjatuhkan putusan didasari dengan hasil putusan BPSK yang telah diputusan dan dikeluarkan oleh BPSK.

Terkait pada kasus antara Waris Antoro dengan BFI Finance, para pihak bersama majelis BPSK memilih dan bersepakat menyelesaikan sengketanya dengan cara mediasi, dimana uraian penyelesaian kasusnya seperti pada skema dibawah ini,



21 HARI





Berdasarkan pada skema di atas, dapat dijelaskan bahwa Penyelesaian kasus pada Waris Antoro selaku pihak Pengadu atau konsumen Akhir (Pihak Pertama) dengan *BFI Finance* selaku pihak Teradu atau Pelaku Usaha (Pihak Kedua) pada BPSK. mula-mulanya dilakukan suatu permohonan oleh Pihak Pertama pada BPSK, ketua BPSK menerima permohonan dari pihak pertama dan melakukan penentuan bentuk penyelesaian sengketa yaitu Mediasi disertai penandatanganan surat persetujuan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak dan penentuan jadwal sidang. BPSK membentuk susunan Majelis dan juga penunjukan Mediator. Setelah itu, dilakukannya pemanggilan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, dimana dalam hal ini para pihak selalu datang pada setiap sidang penyelesaian sengketa. BPSK mengeluarkan Surat Perjanjian Damai atas dasar penyelesaian sengketa yang telah diadakan tiga kali dalam persidangan, para pihak diwajibkan melakukan tandatangan pada Surat Perjanjian Damai tersebut. Akan tetapi, disini pihak pertama tidak melakukan tanda tangan lantaran atas dasar tidak menyetujui dari Surat Perjanjian Damai tersebut. BPSK mengeluarkan Putusan BPSK Nomor 011/P.BPSK/10/2017 yang berisikan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat dan dikuatkan dengan Akta Perdamaian dari Surat Perjanjian Damai dan Putusan BPSK tersebut.

Maka dalam kasus Antara Waris Antoro dengan BFI Finance dapat disimpulkan, dalam kasus antara Waris Antoro dengan BFI Finance bermula

pada suatu Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No 5031700047 (selanjutnya disebut PPDPSA), dimana Waris Antoro merupakan pihak yang melakukan pembelian barang dengan melakukan pembayaran secara angsuran kepada BFI Finance, akan tetapi pada angsuran ke 4 (empat) Waris Antoro tidak mampu membayar angsuran tersebut sehingga dikaitkan dengan pasal 12.2 PPDPSA tentang Peristiwa Cidera Janji bahwa apabila Waris Antoro (debitur) tidak membayar atau terlambat membayar sesuai dengan pasal 12.2 maka BFI Finance (Kreditur) dapat melakukan lelang atau penjualan dibawah tangan terhadap barang jaminan berupa yang telah dijaminkan dan pengakhiran perjanjian yang telah dibuat.

Pihak Waris Antoro merasa tidak menerima atas perlakuan yang telah dilakukan oleh petugas penyitaan barang jaminan dari pihak BFI Finance yang mengelabui Waris Antoro dalam melaksanakan penyitaan barang jaminan. Maka Waris antoro mengajukan permohonan terkait sengketa antara pelaku usaha dan konsumen ke BPSK. hingga pada akhirnya dilakukanlah penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK. pada penyelesaian kasus tersebut di BPSK ditemukan fakta bahwa dalam Surat Perjanjian Damai No. 011/SPD/10/2017 salah satu pihak tidak melakukan tanda tangan, yaitu pihak Waris Antoro selaku konsumen.

Terkait dengan tidak ditandatanganinya Surat Perjanjian Damai tersebut menyalahi ketentuan Pasal 37 ayat (1) KEPMEN 350 yang menyebutkan bahwa,

“Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersangkutan”

Dimana hasil penyelesaian sengketa pada Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan pada sengketa tersebut. Akan tetapi dalam hal ini, salah satu pihak tidak melakukan tandatangan pada Surat Perjanjian Damai dan BPSK mengeluarkan putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017 yang dalam hal ini dipertanyakan kekuatan hukumnya karena tidak ditandatanganinya Surat Perjanjian Damai. Terkait pada kasus ini, para pihak memilih model penyelesaian dengan cara mediasi yang dalam hal ini tidak ada fasilitas upaya hukum keberatan yang diatur oleh PERMA No.1 Tahun 2006, sehingga masih dipertanyakan dari kekuatan hukum pada Putusan No. 011/P.BPSK/10/2017. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan analisis tentang Kekuatan Hukum Putusan No 011/P.BPSK/10/2017 sebagaimana berikut.

### **3. Kekuatan Hukum Putusan No 011/P.BPSK/10/2017 Apabila Tidak Ditandatanganinya Surat Perjanjian Damai Oleh Salah Satu Pihak**

#### **3.1. Dasar Hukum BPSK Mengeluarkan Putusan Perdamaian Apabila Tidak Ditandatanganinya Perjanjian Damai oleh Salah Satu Pihak.**

Pada dasarnya BPSK mengeluarkan putusan sesuai dengan peraturan pada UUPK serta peraturan Kepmen perindag tentang

pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK sendiri. Dalam hal ini dapat diketahui pada ketentuan UUPK pada pasal 55 yang menyebutkan bahwa,

“Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.”

Dan disebutkan juga bahwa putusan yang dikeluarkan oleh BPSK memiliki kekuatan hukum seperti pada pasal 54 ayat (3) UUPK yang menyebutkan bahwa,

“Putusan majelis bersifat final dan mengikat.”

Dalam hal ini dasar BPSK wajib mengeluarkan putusan sengketa konsumen, dimana terkait kekuatan hukum putusan bersifat tetap yaitu final dan mengikat para pihak. Akan tetapi berbeda dengan kasus yang terjadi pada kasus Waris Antoro dengan BFI Finance. Dimana Surat Perjanjian Damai tidak ditandatangani oleh salah satu pihak dan juga dalam hal ini BPSK mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Terkait dengan ketentuan mengenai dasar pengeluaran putusan BPSK juga diatur di Kepmen perindag tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK pada ketentuan putusan pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan mengenai hasil penyelesaian sengketa, yaitu:

“Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis

yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan<sup>36</sup>”

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa sebelum adanya putusan yang dikeluarkan BPSK hanya sebatas pada apabila dari hasil musyawarah atau persidangan penyelesaian sengketa konsumen dibuatkan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal ini adalah konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Pada ketentuan selanjutnya pada pasal 37 ayat (2), (3), dan (4) menyebutkan bahwa

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

(3) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memuat sanksi administratif.

(4) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

Dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 37 ayat (2), (3), dan (4) tidak menjelaskan terkait apabila salah satu pihak tidak menandatangani surat perjanjian perdamaian yang disamakan dengan kesepakatan perjanjian tersebut. Dasar hukum dari BPSK mengeluarkan Putusan yang didasari apabila salah satu pihak tidak menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut tidak diatur dalam ketentuan UUPK dan juga KEPMEN 350 tentang pelaksanaan

---

<sup>36</sup> Pasal 37 ayat (1) KEPMEN 350



tugas dan kewenangan BPSK. Timbullah kekosongan hukum pada ketentuan perundang-undangan ini. Apabila terjadi permasalahan seperti ini terulang kembali akan meresahkan para pihak khususnya konsumen yang meminta hak dan keadilannya terpenuhi serta kepastian hukum yang akan dicapai.

Maka dalam hal ini kembali pada ketentuan dasar KUHPerdara pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Tidak tercapainya ketentuan mengenai kesepakatan dalam syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara. Maka dalam hal ini Surat Perjanjian Damai dapat dibatalkan karena dalam hal ini tidak memenuhi syarat subyektif dari syarat sahnya perjanjian tersebut berlaku.

Maka dapat diketahui dari kekuatan hukum perjanjian perdamaian yang tidak ditandatangani oleh salah satu pihak telah melanggar syarat sahnya perjanjian. Maka surat perjanjian perdamaian ini dapat dibatalkan dan juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada pihak yang tidak sepakat dalam ketentuan perjanjian tersebut. Akan tetapi dilihat pada ketentuan putusan BPSK Nomor 011/P.BPSK/10/2017 menyebutkan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini sangat kontradiktif antara surat perjanjian damai dengan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK.

Terkait dengan akibat hukum apabila tidak ditandatanganinya surat perjanjian perdamaian juga belum diatur pada UUPK dan

Kepmen perindag, maka dalam hal ini apabila suatu surat perjanjian perdamaian tidak ditandatangani oleh salah satu pihak. Maka pihak yang tidak menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya.

### 3.2. Kekuatan Hukum Putusan No. 011/P.BPSK/10/2017

Dalam Permasalahan kasus ini, Perjanjian Damai yang telah dibuat secara tertulis oleh BPSK dengan berdasarkan kesepakatan para pihak tidak ditandatangani oleh salah satu pihak, yaitu pihak pengadu. Bahwa menurut wawancara pihak pengadu tidak menyepakati untuk membayar sebesar 8 juta rupiah atau merasa keberatan dengan pembayaran tersebut. Maka dalam hal ini dapat dilihat pada kekuatan hukum perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian hasil musyawarah para pihak.

Surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK ini merupakan pengesahan terhadap para pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi<sup>37</sup>, para pihak sepakat membuat perjanjian tertulis, dan pada saat itu perjanjian ditandatangani oleh para pihak, maka sejak saat itu pula mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata bahwa mereka sepakat mengikatkan dirinya dan juga sesuai pada Pasal 1338 ayat (1) KUH

---

<sup>37</sup> Nurmadjito, **Pengaturan Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 25

Perdata antara lain yaitu semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dengan perkataan lain mengikat para pihak bagaikan Undang-Undang.

Upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada suatu keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara aktif membantu mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Sesuai dengan Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan diluar pengadilan saja, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut dilakukan bagi para pihak yang beracara di pengadilan<sup>38</sup>.

- a. Adapun pertimbangan dari Mahkamah Agung, mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan.
- b. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberi akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

---

<sup>38</sup> Achmad Ali. **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal 372

- b. Di samping itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Maka dengan penjelasan tersebut, surat perjanjian perdamaian juga memiliki sifat yang mengikat. Dimana ketentuan tersebut merupakan dasar berakhirnya suatu permasalahan atau sengketa yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen. Dimana perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya<sup>39</sup>.

Terkait permasalahan pada kasus BPSK kota Malang, yaitu tidak ditandatanganinya surat perjanjian damai. Dalam peraturan UUPK dan KEPMEN 350 tidak mengatur mengenai akibat hukum dari suatu perjanjian yang apabila salah satu pihak tidak menandatangani surat perjanjian tersebut. Maka penulis kembali pada ketentuan KUHPerdara.

di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain<sup>40</sup>:

- a) Kesepakatan, bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak dimana dalam hal ini harus memperhatikan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang

---

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 7

<sup>40</sup> Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hal 73-76.

mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat diibaratkan sebagai suatu pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.

- b) Kecakapan Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.
- c) Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata).

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah<sup>41</sup>:

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,



d) Suatu sebab yang halal, Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.

Dua syarat pertama merupakan syarat *subjektif* karena dalam hal ini mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan dalam perjanjian ini)<sup>42</sup>.

Dalam hal ini, Surat Perjanjian Damai tidak ditandatangani oleh salah satu pihak maka dilihat dari 1320 KUHPERDATA

---

<sup>42</sup> Herniawati, **Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)**, Jurnal Ipteks Terapan Research of Applied Science and Education V8.i4 (175-182), 2015, hal 176

kesepakatan disini tidak tercapai dan menyalahi syarat subyektif. Akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Mengenai timbulnya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian terdapat empat teori<sup>43</sup>, yaitu

- a. Teori pernyataan (*uitingsheorie*), dimana kesepakatan terjadi pada saat pihak menerima penawaran itu menulis surat jawaban yang menyatakan bahwa pihak tersebut menerima penawaran yang telah dibuat.
- b. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), dimana kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima mengirimkan telegram, surat, atau telex. Menurut teori ini hanya dengan tanggal cap pos pada saat pengiriman jawaban penerimaan dipakai sebagai pegangan kapan saat lahirnya perjanjian.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan menurut teori ini terjadi apabila pihak yang menawarkan tersebut mengetahui adanya *acceptie* atau suatu penerimaan dalam bentuk tindakan. Akan tetapi, penerimaan tersebut tidak diketahui secara langsung oleh pihak yang menawarkan.
- d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan menurut teori ini merupakan suatu kesepakatan yang terjadi saat pihak

---

<sup>43</sup> R.Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta Bandung, Bandung, 2005, hal 59

yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Terkait hal ini, suatu kesepakatan pada kasus ini melihat dari fakta yang telah ada, dimana pihak konsumen tidak melakukan kesepakatan yang telah dihasilkan dari persidangan di BPSK. menganalisis terkait teori kesepakatan menurut Riduan Syahrani bahwa

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”

Dikaitkan kembali pada ketentuan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata. Dimana dalam hal ini perjanjian dapat menjadi sah, para pihak harus memberikan persetujuan atau kesepakatan yang akan dikehendaki pada perjanjian yang telah dibuat. Harus ada pernyataan setuju dalam sebuah kesepakatan perjanjian, pernyataan tersebut dapat dinyatakan melalui lisan atau dengan tanda seperti tanda tangan, apabila tidak dilakukan hal ini, perjanjian tersebut tidak sah karena tidak ada kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjiannya. Maka dalam hal ini perjanjian tersebut tidak dapat mengikatkan para pihaknya.

Dikaitkan kembali pada kasus Surat perjanjian damai No. 011/SPD/10/2017 dimana salah satu pihak tidak menandatangani surat perjanjian damai, hal ini menunjukkan bahwa pihak yang tidak menandatangani surat perjanjian damai tersebut tidak berkehendak dan sepakat dari surat perjanjian damai yang telah dibuat.

Beralih pada ketentuan pasal 37 ayat (1) KEPMEN 350 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yang menyebutkan bahwa:

“Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.”

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hasil penyelesaian sengketa secara mediasi dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Apabila dikaitkan dalam kekuatan putusan 011/P.BPSK/10/2017 yang dikeluarkan oleh BPSK sendiri memberikan amar putusan poin ke tiga yaitu putusan bersifat final dan mengikat. Dimana diketahui bahwa surat perjanjian perdamaian tidak ditandatangani oleh salah satu pihak maka perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka putusan ini dapat dibatalkan. putusan ini tidak memiliki kepastian hukum yang menunjuk pada ketentuan yang jelas. Dalam hal ini putusan BPSK megatakan bahwa perjanjian tersebut final dan mengikat, akan tetapi Surat Perjanjian

Damai tidak ditandatangani oleh salah satu pihak, dimana menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang berperkara.

Seperti penjelasan di atas mengenai tidak ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian, maka tidak terpenuhinya unsur kesepakatan pada syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320-1328 KUHPdata dan juga ketentuan Pasal 37 ayat (1) Kepmen Perindag 350, putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017 memiliki kekuatan hukum final dan mengikat, akan tetapi dikatakan cacat. Maka dalam hal ini dapat dibantah mengenai kekuatan hukum dari Putusan hasil mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut. Karena dalam Surat Perjanjian Perdamaian melanggar syarat Subyektif dimana dalam hal ini dapat dibatalkan.

## **B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Salah Satu Pihak Yang Tidak Menandatangani Surat Perjanjian Damai Terhadap Putusan BPSK**

### **1. Pengertian Umum Mengenai Upaya Hukum**

Pada upaya hukum acara perdata Indonesia, terdapat upaya hukum biasa yaitu perlawanan (*verzet*), banding (revisi), dan kasasi (*cassatie*), serta terdapat juga upaya hukum luar biasa yang dapat berupa peninjauan kembali dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga)<sup>44</sup>. Dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) ataupun perkara niaga tidak dikenal dengan upaya hukum banding sehingga dalam

---

<sup>44</sup> Merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan upaya hukum penyitaan milik pihak ketiga. (pasal 165 ayat 6 HIR)



PHI dan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa *verzet* dan kasasi serta upaya hukum peninjauan kembali<sup>45</sup>.

Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan, banding, kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>46</sup>.

Maksud atau tujuan dari upaya hukum menurut pandangan Lilik Mulyadi adalah<sup>47</sup>,

1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang yang dilakukan oleh hakim
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan proses peradilan
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa dalam memberikan keterangan-keterangan atau bukti baru (*novum*).

Upaya Hukum dapat dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pada dasarnya upaya hukum pada KUHAP hampir sama

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 307

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>47</sup> *Op.cit.*, hal. 308



dengan upaya hukum pada hukum acara perdata, dimana dalam upaya hukum acara perdata dapat dilakukan dengan upaya hukum biasa dan upaya hukum peninjauan kembali. Pada hakikatnya tujuan dari upaya hukum pada acara perdata juga untuk memberikan hak tergugat ataupun penggugat yang tidak menerima dari hasil putusan hakim. Maka diberikannya fasilitas hukum untuk upaya hukum selanjutnya kepada para pihak yang merasa tidak puas atau tidak menerima hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

## 2. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

### 1.1 Upaya Hukum Biasa

#### 1.1.1 Perlawanan (*verzet*)

Upaya hukum perlawanan telah diatur dalam Pasal 123 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR atau Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 RBg. Dilakukan terhadap tergugat yang telah dijatuhi putusan ketidakhadiran (*verstek*). Di dalam praktik peradilan, upaya perlawanan dilakukan tergugat kepada pengadilan negeri yang telah menjatuhkan putusan *verstek* dan kedua perkara tersebut (*Verstek* dan *Verzet*) dijadikan satu.

Dalam mengajukan upaya hukum perlawanan harus dilakukan oleh pihak yang dijatuhi putusan *verstek* atau pihak-pihak dalam perkara. Menurut Mahkamah Agung, tidak

diperkenankan diajukannya upaya perlawanan oleh pihak yang tidak dijatuhi putusan *Verstek*<sup>48</sup>.

Tenggang waktu mengajukan upaya hukum perlawanan sesuai dengan Pasal 129 ayat (1) HIR, Pasal 153 ayat (3) RBg. adalah :

- a. Dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat secara sah;
- b. Sampai dengan hari kedelapan setelah dilakukannya peringatan pelaksanaan putusan sebagaimana ketentuan pasal 196 HIR, Pasal 207 RBg. dalam hal pemberitahuan putusan *verstek* tidak diberitahukan kepada tergugat itu sendiri; dan
- c. Apabila tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut sampai dengan hari keempat belas setelah dilaksanakannya perintah tertulis menurut ketentuan Pasal 197 HIR, pasal 208 RBg.

Pada persidangan *verzet*, kedudukan pelawan tetap sebagai tergugat semula, sedangkan pihak terlawan yaitu pihak penggugat asal yang selanjutnya diletakkan beban

---

<sup>48</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Indonesia Jilid II Tahun 1977, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 327-329

pembuktian<sup>49</sup>. Pada upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan satu kali dan apabila dalam pemeriksaan tentang perlawanannya diputusa sekali lagi dengan putusan verstek, tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum perlawanan untuk kedua kalinya dan jika tergugat masih mengajukan upaya hukum perlawanan, harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 129 ayat (5) HIR, Pasal 153 ayat (6) RBg.

#### 1.1.2 Banding (*appeVrevisilhoeger beroep*)

Peradilan pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan ulangan atau revisi dari putusan Pengadilan Negeri. Maka sebagai peradilan tinggi melakukan pemeriksaan kembali perkara perdata dalam keseluruhan terkait mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Dengan demikian, peradilan tingkat banding sering disebut juga dengan istilah “peradilan tingkat kedua” atau disebut dengan *yudex facti*<sup>50</sup>.

Pada dasarnya, upaya hukum banding yang ideal dilakukan oleh para pihak yang merasa dirinya dirugikan oleh pihak yang dikalahkan dengan putusan pengadilan negeri atau

---

<sup>49</sup> Huruf E dan G Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964

<sup>50</sup> *Op.cit.*, hal. 148

yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 199 RBg., dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Akan tetapi dalam hal ini, di dunia praktik peradilan tidak jarang bahwa pihak yang menang dalam artian diuntungkan oleh putusan pengadilan negeri melakukan upaya hukum banding dengan berbagai macam landasan yuridis maupun non yuridis<sup>51</sup>.

Secara Teori, pada dasarnya pengaturan upaya hukum banding diatur dalam Pasal 188-194 HIR (untuk Jawa dan Madura) dan Pasal 199-205 RBg. (untuk luar Jawa dan Madura). Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka pasal yang terkait pada upaya hukum banding dalam HIR dinyatakan tidak berlaku. Terkait pada ketentuan pasal 199-205 RBg. mengenai upaya banding diluar Jawa dan Madura terdapat dilematis<sup>52</sup> pandangan. Karena ada pandangan yang menyatakan bahwa Pasal pada RBg. yang menyangkut upaya hukum banding tidak berlaku sejak adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 sehingga untuk acara pemeriksaan banding diatur dalam ketentuan Undang-Undang

---

<sup>51</sup> *Op.cit.*, hal 125

<sup>52</sup> situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yang sulit dan membingungkan, Diakses pada hari Selasa, tanggal 1/05/2018 pukul 23.12

Nomor 20 Tahun 1947. Selain pendapat tersebut, ada pula yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai upaya hukum banding dalam RBg. masih tetap berlaku hingga saat ini. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 hanya tertuju pada hukum acara pidana, karena dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa HIR seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman dalam acara pidana untuk seluruh Indonesia, sedangkan pada hukum acara perdata baik yang termuat dalam HIR dan RBg. tetap berlaku penuh<sup>53</sup>.

#### 1.1.3 Kasasi (*cassatie*)

Kasasi merupakan lembaga hukum di Prancis dengan istilah “*cassation*” dan berasal dari kata kerja “*casser*” yang berarti membatalkan atau memecahkan. Dimana dalam hal ini salah satu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Pada tingkat kasasi tidak dilakukannya suatu pemeriksaan kembali dari perkara tersebut, akan tetapi hanya diperiksa masalah hukum atau penerapan dari hukumnya. Dengan demikian, dalam hal ini yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara perdata adalah pihak yang berperkara atau wakil/yang dikuasakan untuk itu sesuai pada Pasal 44 ayat

---

<sup>53</sup> *Op.cit.*, hal 169

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Jaksa agung karena jabatannya dalam permohonan kasasi dilakukan demi kepentingan hukum sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), dan permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali terhadap perkara yang sama atau yang telah menggunakan upaya hukum ulangan atau banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009<sup>54</sup>.

## 1.2 Upaya Hukum Luar Biasa

### 1.2.1 Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta dalam Pasal 34 dan Pasal 67-76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ataupun Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat disangkal kembali. Upaya hukum Peninjauan kembali harus diajukan oleh para pihak yang berperkara, ahli waris, atau seorang wakil yang telah dikuasakan dalam hal itu sesuai pada Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>54</sup> *Op.cit.*, hal 335



2009. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali dan ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara sesuai pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

#### 1.2.2 *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)

Upaya hukum luar biasa dalam hal ini merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakim yang merugikan pihak ketiga tersebut. Dalam praktiknya, perlawanan pihak ketiga dapat dilakukan terhadap sita *conservatoir* (sita jaminan terhadap barang milik tergugat), sita *revindicatoir* (sita jaminan terhadap barang milik penggugat), dan sita eksekusi atas dasar hak milik. Dalam melakukan upaya hukum ini, hanya pemilik atau orang yang merasa dirinya pemilik barang yang disita<sup>55</sup>.

### 3. Upaya Hukum Keberatan Dalam BPSK

Upaya hukum keberatan pada BPSK dilakukan apabila para pihak atau salah satu pihak dari hasil penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK yang berupa putusan atau hasil penyelesaian hukum lainnya. Dalam hal ini, salah satu pihak yang mengajukan tidak setuju atau keberatan dalam

---

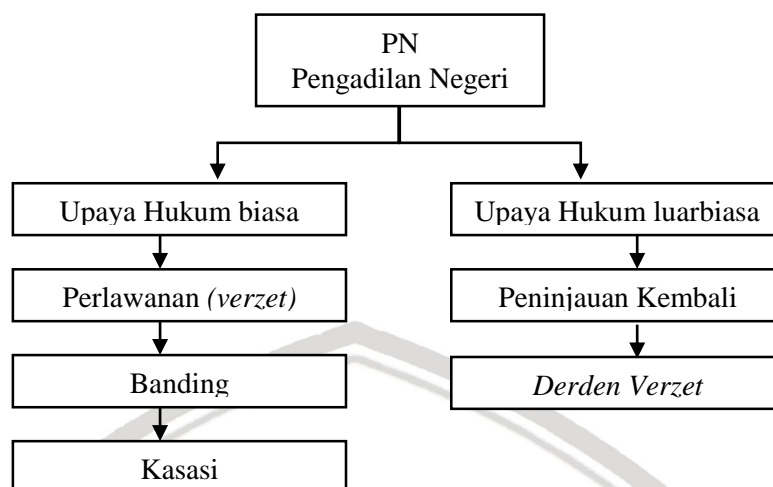
<sup>55</sup> *Ibid.*,

hasil penyelesaian sengketa tersebut. Dalam UUPK dan KEPMEN tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK memberikan kesempatan 14 (empat belas) hari untuk melakukan upaya hukum keberatan terhadap hasil dari penyelesaian sengketa di BPSK.

Upaya hukum Keberatan pada BPSK dapat dilakukan pada putusan Arbitrase, dapat dilihat kembali pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. dimana dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2006 menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan keberatan hanyalah Arbitrase.

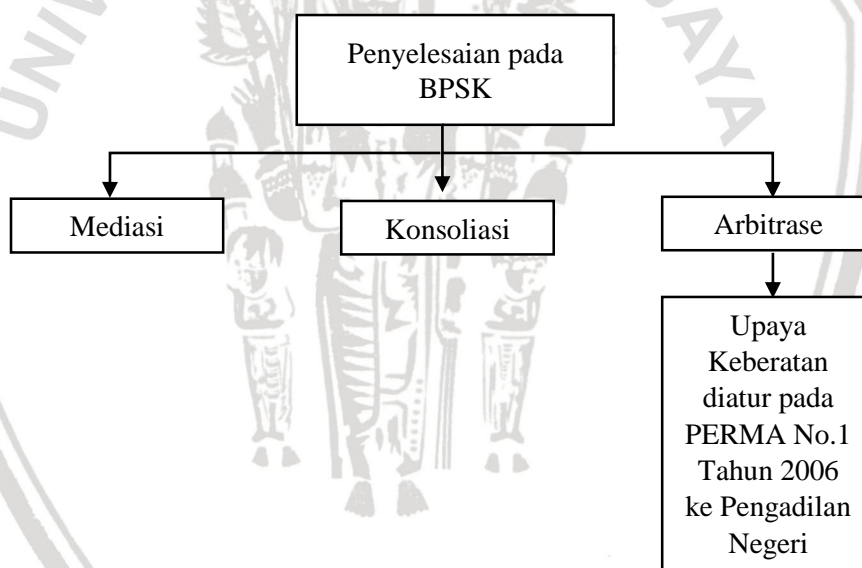
Pengajuan keberatan pada putusan Arbitrase sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2006 menjelaskan bahwa keberatan diajukan melalui pengadilan negeri, dimana dalam hal ini disamakan dengan prosedur pendaftaran perkara perdata. Dalam upaya keberatan yang diajukan kepengadilan negeri, hakim dalam menyelesaikan kasusnya ditinjau berdasarkan hasil putusan BPSK. Upaya Hukum keberatan pada BPSK pada penyelesaian sengketa Mediasi dan konsiliasi tidak diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2006 karena menurut hasil wawancara terhadap salah satu majelis dalam BPSK menjelaskan bahwa hasil penyelesaian dari mediasi dan konsiliasi tidak dapat mengajukan keberatan. oleh karenanya, dalam penyelesaian Mediasi dan konsiliasi dapat mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Negeri seperti prosedur perkara perdata biasa.

**Bagan 4.3 : Upaya Hukum Acara Perdata**



Sumber: diolah penulis dari pembahasan tentang upaya hukum pada Hukum Acara Perdata Tahun 2018

**Bagan 4.4 : Upaya Hukum Pada BPSK**



Sumber: diolah penulis dari pembahasan tentang upaya hukum pada BPSK pada Tahun 2018

Pada Bagan di atas, dapat diketahui upaya hukum pada hukum acara perdata dengan upaya hukum yang ada pada BPSK. dimana dalam upaya hukum di BPSk dengan model penyelesaian sengketa mediasi dan konsiliasi tidak difasilitasi oleh peraturan perundang-undangan mengenai

upaya hukum keberatan, sedangkan pada penyelesaian sengketa model arbitrase diberikan fasilitas oleh peraturan PERMA No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK.

**4. Upaya Hukum Pada Putusan Hasil Mediasi yang Dikeluarkan Oleh BPSK apabila Surat Perjanjian Damai Tidak Ditandatangani Salah Satu Pihak.**

Menurut ketentuan pasal 54 ayat (3) UUPK menjelaskan bahwa putusan BPSK merupakan hasil penyelesaian sengketa konsumen yang bersifat final dan mengikat. Dimana dalam hal ini dikaitkan dengan prinsip *Inkracht Van Gewisjde*, menyatakan bahwa suatu putusan dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimungkinkan melakukan upaya hukum selanjutnya. Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa terhadap putusan BPSK yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, dan terhadap putusan Pengadilan tersebut dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif.

Permasalahan tidak hanya timbul pada kekuatan akta perdamaian dan juga putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, akan tetapi juga pada upaya keberatan yang dapat dilakukan oleh para pihak. Tidak adanya kepastian hukum yang jelas, teratur dan konsisten pada peraturan yang berlaku. Dalam hal ini banyak suatu permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dari *das sollen* dan *das sein* itu sendiri. Sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang bersangkutan.

Pada ketentuan yang tercantum pada UUPK Pasa 58 ayat (2) menjelaskan terkait putusan BPSK dapat diajukan keberatan, yaitu:

“Tehadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Dalam hal ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 58 ayat (2) UUPK bahwa putusan BPSK hanya dapat dilakukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri dan juga dapat diajukan ke Mahkamah Agung, Permasalahan yang timbul pada UUPK telah diperhatikan oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan PERMA No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Dalam hal ini mengenai upaya keberatan dapat terjawab dari permasalahan yang timbul pada UUPK. Pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2006 menjelaskan tata cara keberatan pada putusan BPSK mulai dari pengajuan keberatan, pemeriksaan, serta penetapan eksekusi dari putusan BPSK itu sendiri.



Apabila dikaitkan dengan putusan BPSK Nomor 011/P.BPSK/10/2017 dan juga pada akta perdamaian Nomor 010/SPD.BPSK/07?2017 maka dalam hal ini seharusnya dapat dimintakan upaya keberatan. Dalam kasus ini para pihak menggunakan penyelesaian sengketa secara mediasi. Kembali pada peraturan PERMA No. 1 Tahun 2006 yang menjelaskan putusan yang dapat diajukan keberatan terdapat pada pasal 2.

*Pasal 2*

“Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK”

Dalam hal in hanya putusan arbitrase yang dapat diajukan keberatan pada upaya keberatan selanjutnya. Terkait mengenai putusan konsiliasi dan mediasi belum diatur dalam PERMA No.1 tahun 74. Maka terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan tata cara pengajuan keberatan. Dimana dalam hal ini tidak menjelaskan bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK yang sebenarnya apabila telah terjadi upaya keberatan. Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam kasus ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Dimana dalam hal ini diawali dengan pengajuan gugatan perkara perdata pada pengadilan negeri, apabila telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan para pihak memungkinkan melakukan upaya hukum keberatan dapat dimintakan Banding, apabila belum puas dengan hasil penyelesaian pada tingkat Banding dapat mengajukan pada tingkat kasasi.

Pengajuan Upaya Hukum ke Pengadilan dapat dilihat dasar dari pengajuan perkara ke pengadilan. Terdapat ketentuan yang harus dilihat sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari kompetensi Pengadilan sendiri, dimana kompetensi pengadilan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu

Kompetensi Absolut, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 :

- a. Didasarkan pada lingkungan memiliki kewenangan
- b. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili (*diversity jurisdiction*).
- c. Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subyek/materinya
- d. Masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya.

Secara garis besar kompetensi absolut memiliki 4 (empat) wilayah pengadilan yaitu,<sup>56</sup>

1. Peradilan Umum Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, berwenang mengadili perkara pidana (khusus dan umum) dan perdata (umum dan niaga).

---

<sup>56</sup> Radang S. Ivan, Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan, Lex Privatum, Vol.IV/No.1/Jan/2016, 2016, hal 26

2. Pengadilan agama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) berwenang mengadili perkara :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah
- h. Ekonomi syari'ah
- i. Itsbat kesaksian rukyatul hilal (Pasal 52 A)

3. Peradilan TUN (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), berwenang mengadili sengketa TUN

4. Peradilan Militer (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), berwenangan mengadili perkara pidana dengan terdakwa prajurit TNI

Kompetensi Relatif, kewenangan pengadilan untuk menangani kasus atau perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Atau suatu kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya.

Asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif yaitu,<sup>57</sup>

- a. Gugatan diajukan di pengadilan dimana tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*)
- b. Gugatan diajukan dimana benda tetap yang menjadi obyek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*)
- c. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang
- d. Eksepsi pada kompetensi relatif diajukan pada sidang pertama, atau setidak-tidaknya sebelum menggunakan eksepsi lain. Jika waktu eksepsi tersebut lewat, maka hakim tidak perlu memperhatikan eksepsi tersebut.

Terkait pada permasalahan kasus yang telah dibahas di atas, para pihak yang tidak menandatangani surat perjanjian damai dan dikeluarkannya putusan oleh BPSK dilihat dari penjabaran kompetensi pengadilan di atas bahwa dapat dianalisis bahwa hasil putusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Pada kompetensi absolut terkait poin ke empat, bahwa suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan Negeri apabila kewenangan mengadili perkara/kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya. Pada pasal 7 UUPK dan Pasal 56 bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja

---

<sup>57</sup> *Op.cit.*, hal 25

setelah menerima putusan BPSK. maka terkait hal ini dapat diajukan ke pengadilan negeri. terkait kasus ini, materi gugatan yang dapat diajukan adalah tergantung pada posisi para pihak.

kembali pada kasus yang diselesaikan dengan cara mediasi tidak diatur mengenai upaya keberatan. dalam hal ini, dapat dilihat juga pada kompetensi relatif bahwa terkait kasus hal ini dapat diajukan ke pengadilan atas dasar perkara perdata ataupun pidana. Apabila terkait kasus tidak ditandatanganinya Surat Perjanjian Damai oleh salah satu pihak, dan dalam hal ini terbit suatu putusan yang mengatakan bahwa putusan bersifat final dan mengikat, para pihak dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri.

Terkait pihak yang dapat mengajukan upaya hukum dari hasil putusan tersebut kedua belah pihak dapat mengajukan gugatannya. Apabila dikaitkan dengan kasus pada Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017 dimana salah satu pihak tidak melakukan tanda tangan, PT BFI Finance dapat mengajukan ke Pengadilan dengan materi gugatan mengenai ganti rugi dari kasus perjanjian di awal, dimana Waris Antoro telah melanggar kesepakatan perjanjian pembayaran dengan cara kredit. Dimana akibatnya dalam hal ini, Pengadilan Negeri dapat menguatkan Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017.

Apabila pihak Waris Antoro yang melakukan upaya hukum ke Pengadilan dapat mengajukan materi gugatan terkait permasalahan sengketa yang diajukan kepada BPSK terkait sengketa penyitaan atau



pengambilan barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh pihak Waris Antoro, dimana dalam hal melakukan penyitaan dilakukan dengan cara yang tidak baik. Serta Pihak Waris Antoro dapat mengajukan mengenai keabsahan Putusan BPSK. Akibatnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri dapat menghasilkan putusan yang membatalkan Putusan BPSK dan bisa jadi menerima dan menguatkan putusan BPSK.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kekuatan Putusan Perdamaian Mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK apabila salah satu pihak tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai sesuai pada kasus pada Putusan BPSK Nomor 011/P.BPSK/10/2017. Maka putusan tersebut bersifat mengikat dan final akan tetapi dapat dimintakan suatu pembatalan ke Pengadilan Negeri dengan didasari pada syarat sahnya perjanjian pada 1320-1328 KUHPdata serta dikaitkan pada teori kesepakatan yang dalam hal ini kesepakatan sangat penting dalam suatu perjanjian dan harus dinyatakan secara langsung karena apabila tidak akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang mengatur. Dalam hal Surat Perjanjian Damai 011/SPD/10/2017 melanggar ketentuan pasal 37 ayat (1). Terkait hal ini juga, dasar hukum akibat dari BPSK mengeluarkan putusan yang tidak ditandatangani oleh salah satu pihak belum diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pada upaya keberatan salah satu pihak yang tidak menyepakati perjanjian perdamaian dengan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Dimana dalam hal ini sebenarnya mahkamah agung telah mengeluarkan peraturan mengenai keberatan atas putusan BPSK yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang keberatan

pada putusan yang dikeluarkan oleh BPSK. Akan tetapi peraturan ini menyebutkan pada pasal 2 PERMA No.1 Tahun 2006 bahwa upaya keberatan pada putusan BPSK hanya dapat dilakukan pada putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Maka dalam hal ini para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum keberatan karena tidak adanya peraturan hukum/ adanya kekosongan hukum yang mengatur upaya keberatan terhadap putusan Mediasi. Sehingga dalam hal ini para pihak mengajukan ulang kasus gugatannya seperti pada upaya hukum acara perdata biasa.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Terkait Permasalahan yang timbul, sebaiknya BPSK lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga lebih mengedepankan kepentingan para pihak serta keadilan dari para pihak. Apabila Surat Perjanjian Damai tidak ditandatangani oleh salah satu pihak, maka harus ada upaya hukum untuk menindak lanjuti hal tersebut sebelum pengeluaran putusan BPSK. dimana dalam hal ini Putusan BPSK itu sendiri akan dipertanyakan kekuatan hukumnya karena dasar suatu putusan BPSK berasal dari Surat Perjanjian Damai dari hasil Mediasi tersebut.

### **2. Bagi Masyarakat (Konsumen dan Pelaku Usaha)**

Terkait permasalahan yang timbul, apabila masyarakat menemui kasus apabila suatu perjanjian tidak ditandatanganinya

surat Perjanjian Damai tetapi dikeluarkannya putusan BPSK, maka pihak dapat mengajukan upaya hukum biasa pada pengadilan negeri terkait permasalahan tersebut agar lebih mendapatkan suatu keadilan yang dikehendaki.

### 3. Bagi Legislator

Terkait permasalahan yang timbul pada kasus ini, adanya peraturan perundang-undangan tentang sah atau tidaknya apabila tidak ditandatangani surat perjanjian oleh salah satu pihak, apabila tidak diatur maka akan terjadi ketidak pastian hukum yang mengakibatkan kesewenang-wenangan para pihak dalam melakukan penyelesaian sengketa pada BPSK. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa putusan perdamaian hasil mediasi yang didasari Pada Surat Perjanjian Perdamaian tidak sepenuhnya menyelesaikan sengketa para pihak, perlu diadakannya upaya keberatan agar dalam hal ini konsumen dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tidak selamanya penyelesaian mediasi sesuai dengan kehendak para pihak. Apabila tidak dapat dimungkinkan terjadinya upaya hukum, maka perlu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan terkait agar para majelis hakim harus mendalami keinginan para pihak agar tercapainya suatu penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, **Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)**, Bandung: Nusa Media.
- Abdul Kadir Muhammad, 2005, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, cet. V, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2005, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta Penerbit Toko Gunung Agung,
- Achmad Ali, 2008, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)**, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Ahmad Mujahidin, 2007, **Peradilan Satu Atap di Indonesia**, Bandung, PT Refika Aditama.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2002, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Edisi Pertama PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan, 2004, **Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)**, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Cst Kansil, 2009, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2008, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- I. Rubi dan Chaidir Ali, 2003, **Pengantar Hukum Acara Perdata**, Bandung, Penerbit Alumni.
- Inosentrus Samsul, 2006, **Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Multak**, Jakarta, Universitas Indonesia.
- J. Widjiantoro dan Al Wisnubroto, 2004, **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Janus Sidabalok, 2007, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Bandung, Citra Aditya.



- Jimmy Joses Sembiring, 2010, **Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan**, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Jakarta, Transmedia Pustaka.
- John Echols dan Hasan Shadily, 2010, **Kamus Inggris Indonesia**, Cet. ke xxv, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim, 2013, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2008, **Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia**, Jakarta, PT Djambatan.
- Lilik Mulyadi, 2009, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2007, **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua**, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1999, **Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1977, **Yurisprudensi Indonesia Jilid II Tahun 1977**, Jakarta, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2002, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2002, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**, Jakarta, Citra Aditya.
- Mochammad Dja'is, RMJ. Koosmargono, 2010, **Membaca dan Mengerti HIR**, Semarang, Fakultas Hukum Undip.
- Moh. Taufik Makaro, 2004, **Pokok-pokok Hukum Acara Perdata**, Jakarta, PT Rineka Cipta,
- Munir Fuady, 2010, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurmadjito, 2000, **Pengaturan Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung. Hal.25

- Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R.Setiawan, 2005, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bandung, Bina Cipta Bandung.
- Rachmadi Usman 2005, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi Usman, 2011, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, Bandung, PT Aditya Bakti.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1989, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**, Bandung, Mandar maju.
- Riduan Syahrani, 2004, **Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum**, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Riduan Syahrani, 2006, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Sembiring Sentosa, **Himpunan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang undangan yang Terkait**, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal 89
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta, Cetakan lima, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1990, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Cet. Pertama, Rajawali Press.
- Sofie Yusuf, 2006, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya**, Bandung, Citra Adytia.
- Subekti & Tjitrosudibio, 1985, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta, Liberty.
- Susanti Adi Nugroho, 2006, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia,

Susanti Adi Nugroho, 2008, **Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya**, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2011, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Tangerang, Telaga Ilmu Indonesia.

Susanti Adi Nugroho, 2015, **Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya**, Jakarta, Prenada.

Susanti Adi Nugroho, 2015, **Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya**, Jakarta, Prenada.

Suyut Margono, 2011, **ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum**, Bogor, PT.Graha Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka.

**Upaya Perlindungan Konsumen**, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

Widijantoro, J dan Wisnubroto Al, 2009, **Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen**, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004, **Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Yusuf Shofie, 2014, **Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya**, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

#### Artikel Ilmiah

Az. Nasution, 2006, **Aspek Hukum Perlindungan Konsumen**, *Jurnal Teropong*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Hanum Rahmaniar Helmi, 2015, **Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia**” JHAPER: Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2015

Herniawati, 2015, **Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)**, Jurnal Ipteks Terapan Research of Applied Science and Education V8.i4 (175-182).

Maslihati Nur Hidayati, 2008, **Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Tentang Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen**, Lex Jurnalica Vol.5 No. 3, Agustus 2008 .

Radang S. Ivan, 2016, **Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan**, Lex Privatum, Vol.IV/No.1/Jan/2016.

Riko Kurnia Putra, Moch Djais, Marjo, 2016, **Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/Pn Smg, Diponegoro Law Journal** Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Rilda Murniati, 2015, **Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi**, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.

Zainul Akhyar, 2015, **Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin**. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum)

### Internet

IndonesiaInvestment, <https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/ekonomi/item/177>

Rahmat Sudraja, 2015, **Mengurai Independensi dan Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**,  
<https://www.kompasiana.com/www.brantas50.com/mengurai-independensi-daneksistensi-badan-penyelesaiansengketa-konsumenbpsk564be02e917e61e80413a34c>

